

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI

Volume 10, 2023

2020-2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

Katalog: 7203005.51
ISSN 2477-7773

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI

Volume 10, 2023

2020-2022

<https://bali.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI 2020-2022

Volume 10, 2023

Katalog : 7203005.51
ISSN : 2477-7773
Nomor Publikasi : 51000.23044

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xiv+94 halaman

Penyusun Naskah : BPS Provinsi Bali
Penyunting : BPS Provinsi Bali
Pembuat Kover : BPS Provinsi Bali

Penerbit : ©Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Sumber Ilustrasi : freepik.com, elements.envato.com, unsplash.com.

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

ISSN 2477-7773

TIM PENYUSUN
STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI BALI 2020-2022

Volume 10, 2023

Pengarah :

Endang Retno Sri Subiyandani, S.Si., M.M.

Penanggung Jawab :

I Made Juli Ardana, SST., M.Si.

Penyunting :

I Made Putra Astawa, SE.

Penulis Naskah :

Ni Putu Ridha Octaviani, SST.

Pengolah Data :

Ni Putu Ridha Octaviani, SST.

Penata Letak :

I Gede Arya Agus Yogantara, SST.

Ni Putu Ridha Octaviani, SST.

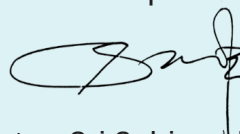
KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi (RB), pilar kelima berupa pelayanan statistik yang berkualitas, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali kembali menerbitkan Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan rutin setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik.

Publikasi ini menyajikan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali dalam kurun waktu 2020–2022. Ulasan singkat mengenai perkembangan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali selama tahun 2020–2022 juga disertakan di dalamnya. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi sehubungan dengan kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Dengan menyadari akan ketidaksempurnaan publikasi ini, kami dengan senang hati menerima masukan, saran, dan kritik yang membangun demi kesempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang.

Denpasar, Oktober 2023
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali,
Kepala



Endang Retno Sri Subiyandani, S.Si., M.M.

DAFTAR ISI

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI 2020-2022

Volume 10, 2023

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
 II. KONSEP DAN DEFINISI.....	 5
2.1. Pendapatan Daerah.....	5
2.2. Belanja Daerah	7
2.3. Pembiayaan Daerah.....	12
2.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	14
2.5. Beberapa Rasio Terkait Keuangan Pemerintah Daerah.....	14
 III. ULASAN RINGKAS	 17
3.1. Gambaran Umum.....	17
3.2. Pendapatan Daerah.....	20
3.3. Belanja Daerah	24
 LAMPIRAN	 31
DAFTAR PUSTAKA.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 3.1.	Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (persen), 2020-2022	17
Tabel 3.2.	Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (persen), 2020-2022	21
Tabel 3.3.	Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja, Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja, dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah se-Provinsi Bali (persen), 2020-2022.....	25

<https://bali.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (triliun rupiah), 2022.....	18
Gambar 3.2.	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali Tahun 2022 terhadap Tahun 2021 (persen).....	19
Gambar 3.3.	Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali Tahun 2022 terhadap Tahun 2021 (persen).....	20
Gambar 3.4.	Derajat Desentralisasi Fiskal menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (persen), 2021-2022	20
Gambar 3.5.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (persen), 2021-2022	22
Gambar 3.6.	Rasio Efektivitas Keuangan Daerah menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (persen), 2021-2022	23
Gambar 3.7.	Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Pemerintah menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (persen), 2021-2022	25
Gambar 3.8.	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Pemerintah menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (persen), 2021-2022	26
Gambar 3.9.	Rasio Efisiensi Belanja menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (persen), 2021-2022	28
Gambar 3.10.	Belanja Pemerintah menurut Fungsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (persen), 2022	29

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana, 2020-2022 (000 Rp)	33
Tabel 2.	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan, 2020-2022 (000 Rp)	36
Tabel 3.	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung, 2020-2022 (000 Rp)	39
Tabel 4.	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar, 2020-2022 (000 Rp)	42
Tabel 5.	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung, 2020-2022 (000 Rp)	45
Tabel 6.	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli, 2020-2022 (000 Rp)	48
Tabel 7.	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem, 2020-2022 (000 Rp)	51
Tabel 8.	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng, 2020-2022 (000 Rp)	54
Tabel 9.	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar, 2020-2022 (000 Rp)	57
Tabel 10.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana, 2020-2022 (000 Rp)	60
Tabel 11.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan, 2020-2022 (000 Rp)	63
Tabel 12.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung, 2020-2022 (000 Rp)	66
Tabel 13.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar, 2020-2022 (000 Rp)	69
Tabel 14.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung, 2020-2022 (000 Rp)	72
Tabel 15.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli, 2020-2022 (000 Rp)	75
Tabel 16.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem, 2020-2022 (000 Rp)	78

Tabel 17.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng, 2020-2022 (000 Rp)	81
Tabel 18.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar, 2020-2022 (000 Rp)	84
Tabel 19.	Ringkasan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali, 2020-2022 (000 Rp)	87
Tabel 20.	Ringkasan Total Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali, 2020-2022 (000 Rp)	90

<https://bali.bps.go.id>

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini didasari asumsi bahwa pemerintah daerah merupakan institusi yang paling mengerti/memahami kondisi daerahnya sendiri. Anggaran pemerintah daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga merupakan instrumen fiskal Pemerintah Daerah dalam mengendalikan perekonomian di wilayahnya. Melalui instrumen tersebut pemerintah daerah dapat melakukan stimulus terhadap perekonomian di wilayahnya guna memicu perkembangan perekonomian wilayahnya.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah melalui Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, terdapat enam fungsi APBD yang wajib diterapkan dalam setiap penyusunannya. Pertama, fungsi otorisasi yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan yang



bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan yang mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Keempat, fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Kelima, fungsi distribusi yang memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Keenam, fungsi stabilisasi yang memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Sejalan dengan fungsi APBD dalam hal perencanaan, pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya diharapkan dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan data potensi suatu wilayah dari sisi pendapatan dan pengeluarannya. Potensi dari sisi pendapatan dapat dimanfaatkan sebagai tolok ukur suatu pemerintahan dalam menentukan kebijakan berdasarkan besaran pendapatan yang diperoleh dalam suatu daerah. Sementara itu, dari sisi pengeluaran dapat menunjukkan potensi pengeluaran pemerintah yang mungkin membantu memperlihatkan ke mana pendapatan daerah akan dibelanjakan.

Terkait fungsi APBD dalam hal pengawasan, data APBD maupun realisasi APBD kiranya bermanfaat dalam melakukan evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Berbagai rasio keuangan dapat dihitung berdasarkan data APBD dan realisasinya yang kemudian kami sajikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak untuk menilai kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Rasio-rasio keuangan tersebut antara lain rasio ketergantungan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan rasio efisiensi belanja. Rasio-rasio keuangan tersebut kiranya bisa bermanfaat untuk menilai sejauh mana pengelolaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Publikasi ini disusun dengan harapan memenuhi kebutuhan akan data statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali. Disajikan pula gambaran mengenai anggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tahun 2020-2022 serta analisis kondisi fiskal atau keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali berdasarkan data APBD maupun realisasi APBD tahun anggaran 2020-2022.

1.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali 2020-2022, yaitu untuk memenuhi kebutuhan data keuangan (APBD dan realisasi APBD) pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tahun 2020-2022 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.3. RUANG LINGKUP

Data yang disajikan dalam publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali 2020-2022 meliputi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2020-2022. Kabupaten/Kota yang dicakup meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, serta Kota Denpasar. Sementara itu, data yang dicakup merupakan data anggaran/realisasi anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali 2020-2022 merupakan salah satu dari berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Sistematika penulisan publikasi ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II Metodologi, yang terdiri dari Ruang Lingkup, Metode Pengumpulan Data, dan Konsep/Definisi.
3. BAB III Ulasan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali 2020-2022.
4. Lampiran Tabel-tabel
5. Daftar Pustaka

II. KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi dalam publikasi ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

2.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah didefinisikan sebagai penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN dan BUMD.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer didefinisikan sebagai pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer pemerintah pusat adalah pendapatan yang mencakup Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah adalah pendapatan yang mencakup Bantuan Keuangan Umum dan Khusus baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota.





2.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah didefinisikan sebagai pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2.2. BELANJA DAERAH

Belanja daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah terdiri dari : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

2.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai didefinisikan sebagai belanja kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk



barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga didefinisikan sebagai belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi didefinisikan sebagai belanja yang dianggarkan untuk pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah didefinisikan sebagai belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial didefinisikan sebagai belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok



dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2.2.2. Belanja Modal

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah didefinisikan sebagai belanja yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta belanja-belanja lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/kontraktual).

Belanja modal tanah ini terdiri dari belanja modal tanah persil, tanah non persil, dan lapangan.

Belanja modal tanah persil mencakup belanja modal tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal, bangunan gedung perdagangan/perusahaan, bangunan industri, bangunan tempat kerja, bangunan gedung sarana olah raga, bangunan tempat ibadah dan belanja modal tanah persil lainnya.

Belanja modal tanah non persil mencakup belanja modal tanah basah, tanah kering, tanah perkebunan, tanah hutan, tanah tandus, tanah padang alang-alang/rumput, tanah pertanian, tanah pertambangan, dan belanja modal tanah non persil lainnya.

Belanja modal lapangan mencakup belanja modal tanah lapangan olahraga, lapangan parkir, lapangan penimbunan barang, lapangan pemancar dan studio alam, lapangan pengujian/pengolahan, lapangan terbang, modal tanah untuk jalan, bangunan air, bangunan instalasi, bangunan jaringan, bangunan bersejarah, makam, taman, latihan, daerah pertahanan, lapangan PBB, tanah kampung, *emplasment*, dan belanja modal lapangan lainnya.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan belanja yang dilakukan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan didefinisikan sebagai belanja yang dilakukan untuk pengadaan bangunan gedung, bangunan monumen, bangunan menara, dan tugu titik kontrol/pasti.

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan jalan, jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, pengadaan hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, dan aset tetap dalam renovasi.

2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga didefinisikan sebagai pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

2.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer didefinisikan sebagai pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil didefinisikan sebagai pengeluaran uang yang mencakup pengeluaran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan merupakan pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Selain berdasarkan struktur, belanja daerah dapat dikategorikan menurut fungsi. Belanja menurut fungsi terdiri dari fungsi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan perlindungan sosial.

a. **Pelayanan Umum**

Belanja daerah fungsi pelayanan umum didefinisikan sebagai belanja daerah yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah, komunikasi, dan lain-lain.

b. **Ketertiban dan Keamanan**

Belanja daerah fungsi ketertiban dan keamanan didefinisikan sebagai belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pemeliharaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta sejenisnya.

c. **Ekonomi**

Belanja daerah fungsi ekonomi didefinisikan sebagai belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri, ketransmigrasian, dan lainnya.

d. **Perlindungan Lingkungan Hidup**

Belanja daerah fungsi perlindungan lingkungan hidup didefinisikan sebagai belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup, dan sejenisnya.

e. **Perumahan dan Fasilitas Umum**

Belanja daerah fungsi perumahan dan fasilitas umum didefinisikan sebagai belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pekerjaan umum, perumahan, dan sejenisnya.

f. **Kesehatan**

Belanja daerah fungsi kesehatan didefinisikan sebagai belanja daerah yang dikeluarkan untuk program kesehatan, dan sejenisnya.

g. **Pariwisata**

Belanja daerah fungsi pariwisata didefinisikan sebagai belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pariwisata, dan sejenisnya.

h. **Pendidikan**

Belanja daerah fungsi pendidikan didefinisikan sebagai belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor pendidikan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, dan lainnya.

i. **Perlindungan Sosial**

Belanja daerah fungsi perlindungan sosial didefinisikan sebagai belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan perempuan, sosial, dan lainnya.

2.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Digunakan untuk mengetahui besaran pembiayaan neto pemerintah daerah. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

2.3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan penerimaan kembali investasi dana bergulir.

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya didefinisikan sebagai bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

- b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan didefinisikan sebagai Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan didefinisikan sebagai semua penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

- d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan





direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

e. **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

2.3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

a. **Pembentukan Dana Cadangan**

Pembentukan dana cadangan didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

b. **Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi Pemerintah

Daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

c. Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran pokok utang didefinisikan sebagai pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah didefinisikan sebagai pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak ketiga.

2.4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah ditambah dengan pembiayaan pada tahun berkenaan.

2.5. BEBERAPA RASIO TERKAIT KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Selain konsep dan definisi di atas, dalam publikasi ini juga disajikan beberapa rasio yang kiranya dapat bermanfaat dalam menelaah keuangan pemerintah daerah. Berikut uraian dari konsep dan definisi rasio-rasio yang disajikan dalam publikasi ini, yaitu:

2.5.1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal yang juga merupakan rasio PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010: 142). Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan hasil penelitian Tim Litbang Depdagri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 dalam Bisma (2010:78), nilai derajat desentralisasi dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Sangat Kurang, berkisar antara 0 – 10 persen.
- b. Kurang, berkisar antara 10,1 – 20 persen.
- c. Sedang, berkisar antara 20,1 – 30 persen.
- d. Cukup, berkisar antara 30,1 – 40 persen.

- e. Baik, berkisar antara 40,1 – 50 persen.
- f. Sangat Baik, di atas 50 persen.

2.5.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan Pemerintah Daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010 :142).

2.5.3. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas pengelolaan anggaran daerah didefinisikan sebagai ratio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran Munir (2004:48). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD (dianggarkan). Pemerintah telah menyusun pedoman penilaian tingkat efektivitas keuangan daerah, melalui Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996, seperti berikut :

- a. Sangat Efektif, di atas 100 persen
- b. Efektif, berkisar antara 90,1 – 100 persen.
- c. Cukup Efektif, berkisar antara 80,1 – 90 persen.
- d. Kurang Efektif, berkisar antara 60,1 – 80 persen.
- e. Tidak Efektif, kurang dari atau sama dengan 60 persen.

2.5.4. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah

Rasio ini dapat dijelaskan sebagai perbandingan antara Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah. Tujuan penghitungan rasio ini, yaitu untuk mengetahui proporsi belanja daerah yang diperuntukkan pada bagian-bagian belanja yang didistribusikan untuk belanja operasional terhadap total belanja daerah. Belanja operasi bersifat jangka pendek dan pada beberapa kasus bersifat teratur dan berulang-ulang karena memiliki manfaat yang habis dipakai dalam waktu satu tahun. Belanja operasi umumnya mendominasi total belanja daerah sekitar 60-90% (Sholikhah dan Priyono, 2022).

2.5.5. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Rasio ini didefinisikan sebagai perbandingan antara Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur persentase realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Belanja modal bersifat tidak rutin dan memiliki manfaat jangka panjang (Sholikhah dan Priyono, 2022). Norma penilaian menyatakan apabila hasil pengukuran lebih dari 50%, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk

kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/infrastruktur yang membawa kearah perkembangan pembangunan daerah yang lebih baik (Sholeh dkk., 2011).

2.5.6. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio ini didefinisikan sebagai perbandingan antara Realisasi Belanja Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah. Rasio ini dapat menunjukkan tingkat penghematan anggaran pemerintah daerah. Angka pada rasio ini bersifat relatif tanpa adanya standar yang dianggap cocok atas rasio ini. Jika rasio efisiensi belanja kurang dari 100%, maka pemerintah daerah dianggap berhasil melaksanakan efisiensi anggaran. Sebaliknya jika rasio efisiensi belanja lebih dari 100% maka dianggap terjadi pemborosan anggaran (Sholikhah dan Priyono, 2022).

<https://bali.bps.go.id>

III. ULASAN RINGKAS



3.1. GAMBARAN UMUM

Pemerintah daerah dituntut menjadi motor utama untuk menggerakkan perekonomian daerahnya pada masa pemulihan pasca pandemi Covid-19. Pada awal pandemi di tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tercatat sebesar -9,03 persen dan berlanjut hingga tahun 2021 sebesar -2,46 persen. Menghadapi tuntutan tersebut, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat guna sangat diperlukan.

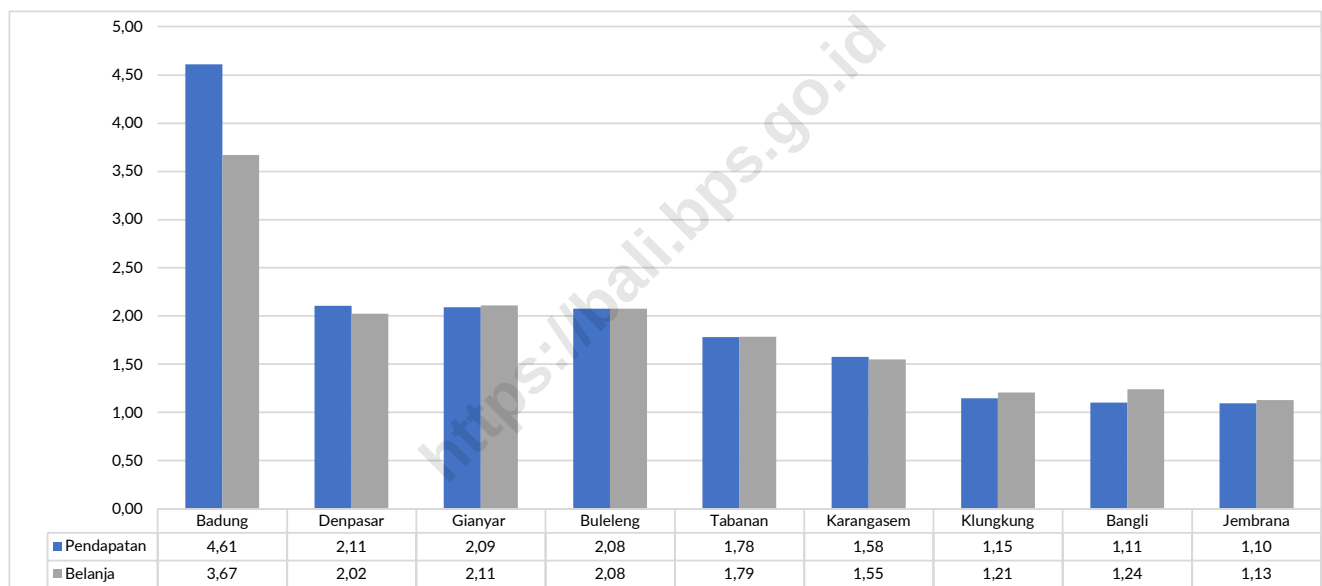
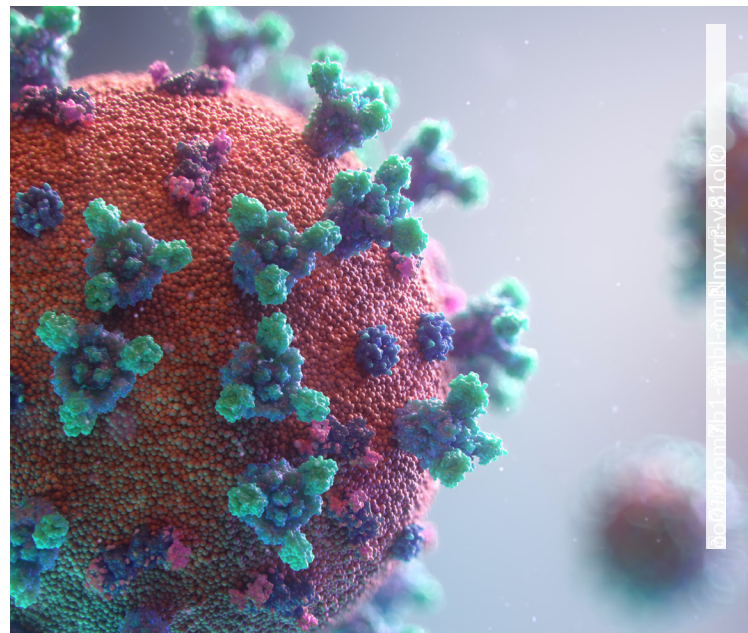
Sejalan dengan laju perekonomian, baik pendapatan maupun belanja pemerintah daerah mengalami penurunan yang cukup dalam pada tahun pertama pandemi. Realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali secara total pada tahun 2020 dan 2021 masih tercatat bernilai negatif. Kemampuan daerah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 juga menurun signifikan sedalam 43,03 persen, namun pada tahun 2021 mulai membaik namun pertumbuhan PAD masih bernilai negatif sebesar -2,88 persen.

Pada tahun 2022, perekonomian Provinsi Bali berangsur

Tabel 3.1. Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (persen), 2020-2022

Indikator	Pertumbuhan			Tingkat Realisasi Anggaran 2022
	2019-2020	2020-2021	2021-2022	
Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali	-17,73	-7,96	17,81	104,31
Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali	-16,86	-6,66	10,47	103,08
PAD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali	-43,03	-2,88	57,74	154,38
Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali 2020 : -9,34				
Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali 2021 : -2,46				
Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali 2022 : 4,84				

pulih yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,84 persen. Realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali meningkat dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali pada tahun 2022 secara total sebesar 17,60 triliun rupiah, lebih tinggi 17,81 persen dibandingkan tahun 2021. Sedangkan belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali pada tahun 2022 secara total sebesar 16,80 triliun rupiah, lebih tinggi 10,47 persen dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022, kemampuan menghasilkan PAD



Gambar 3.1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (triliun rupiah), 2022

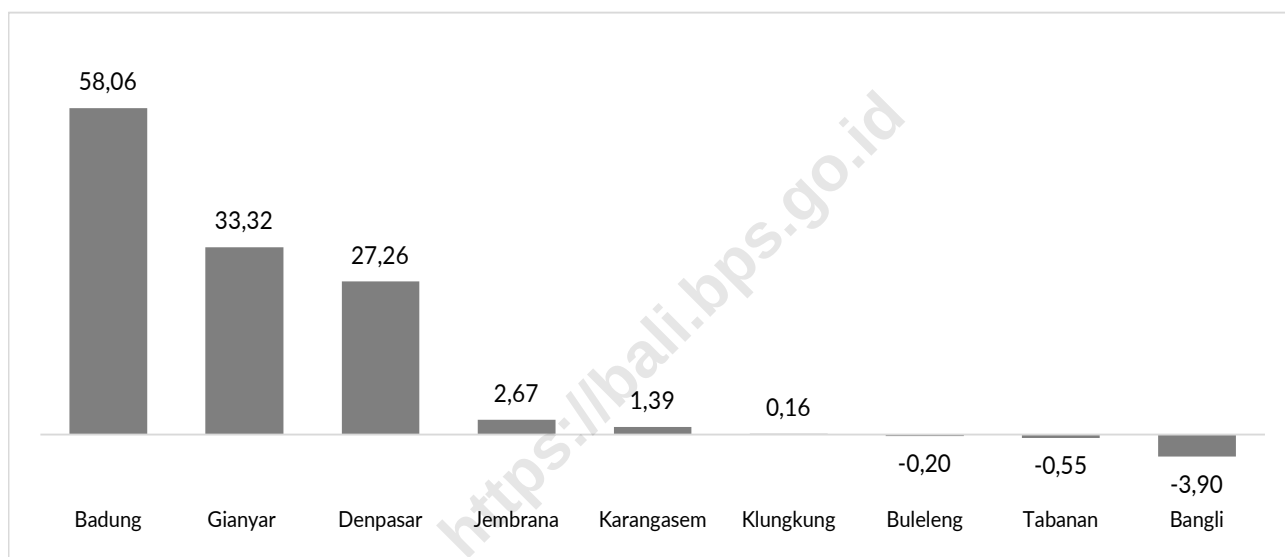
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali mengalami peningkatan sebesar 57,74 persen.

Tingkat realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali pada tahun 2022 tercatat melebihi target. Dilihat dari pendapatan, realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali mencapai 104,31 persen dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota telah terpenuhi secara maksimal. Tingkat realisasi pada belanja dan PAD juga mengalami kondisi yang sama dengan nilai berturut-turut 103,08 persen dan 154,38 persen.

Jika dilihat realisasi pendapatan APBD pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2022 (gambar 3.1), terlihat bahwa Kabupaten Badung memiliki pendapatan paling tinggi

dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Badung tercatat merealisasikan pendapatan APBD sebesar 4,61 triliun rupiah pada tahun 2022 dan melakukan belanja sebesar 3,67 triliun rupiah. Selanjutnya disusul Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar dengan penerimaan APBD masing-masing sebesar 2,11 triliun rupiah dan 2,09 triliun rupiah serta melakukan belanja daerah masing-masing sebesar 2,02 triliun rupiah dan 2,11 triliun rupiah. Sebaliknya capaian realisasi APBD paling rendah tercatat di Kabupaten Jembrana dengan total pendapatan sebesar 1,10 triliun rupiah dan belanja sebesar 1,13 triliun rupiah.

Pada tahun 2022, dari 9 kabupaten/kota di Bali, tercatat 3 pemerintah kabupaten/kota merealisasikan anggaran pendapatan yang lebih besar daripada realisasi belanjanya. Sebaliknya terdapat 6 pemerintah kabupaten mencatatkan realisasi belanja yang lebih besar dari realisasi pendapatannya. Adapun defisit anggaran dari 6 kabupaten/kota tersebut selanjutnya dipenuhi melalui komponen pembiayaan daerah masing-masing. Keenam kabupaten/kota

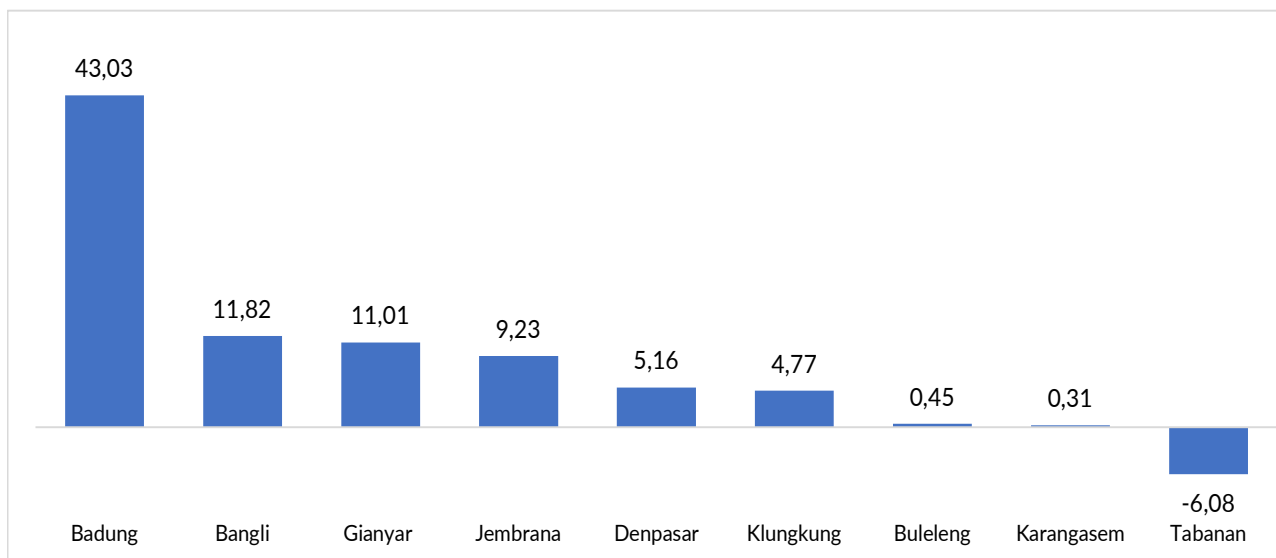


Gambar 3.2. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah menurut Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali Tahun 2022 terhadap Tahun 2021 (persen)

tersebut adalah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Buleleng.

Apabila dilihat dari pertumbuhan realisasi pendapatan daerah menurut kabupaten/kota 2022 terhadap tahun 2021, 3 kabupaten masih mencatatkan kondisi pertumbuhan yang negatif. Hal ini berarti pendapatan yang berhasil direalisasikan pada periode 2022 lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021. Pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten/Kota se-Bali tahun 2022 terhadap 2021 secara rinci dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan di Kabupaten Bangli mengalami penurunan yang paling dalam, yaitu sebesar -3,90 persen. Sebaliknya penurunan yang paling dangkal terjadi di Kabupaten Buleleng yang turun sedalam 0,20 persen. Peningkatan



Gambar 3.3. Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah menurut Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali Tahun 2022 terhadap Tahun 2021 (persen)

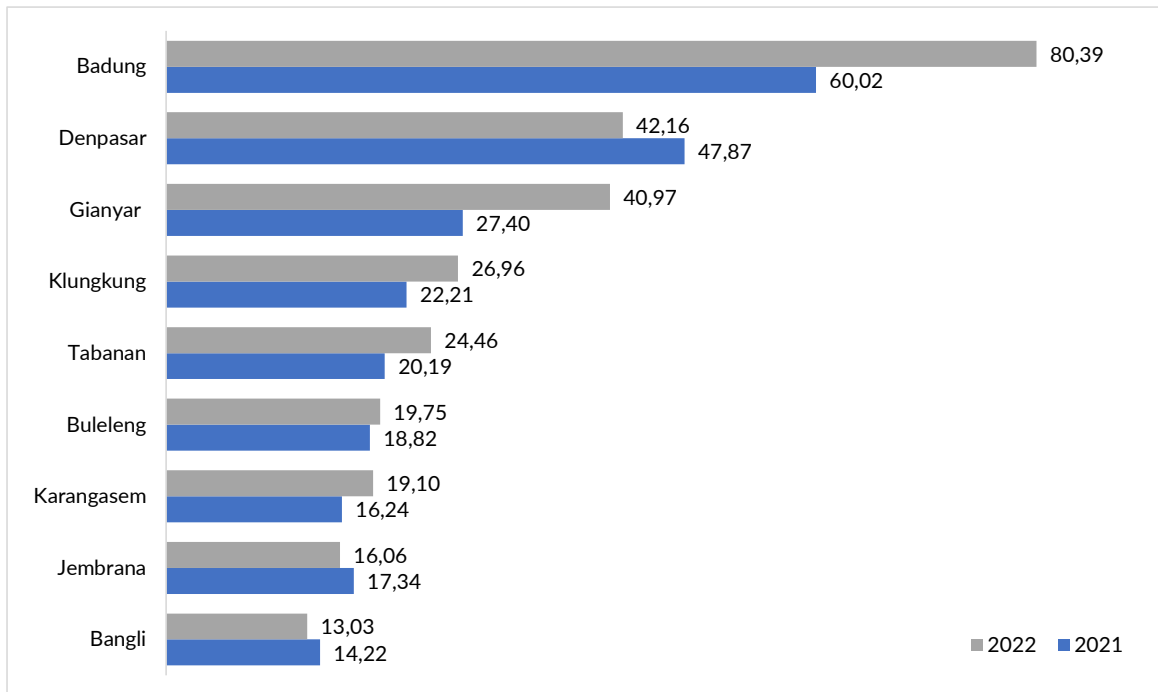
realisasi pendapatan tertinggi terjadi di Kabupaten Badung sebesar 58,06 persen, sedangkan peningkatan terendah terjadi di Kabupaten Klungkung sebesar 0,16 persen.

Seiring dengan mulai membaiknya capaian realisasi pendapatan di beberapa kabupaten/kota, capaian realisasi belanja juga mengalami peningkatan di 8 kabupaten/kota. Penurunan realisasi belanja daerah hanya terjadi di 1 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Tabanan, sebesar -6,08 persen. Sebaliknya peningkatan realisasi belanja tertinggi tercatat di Kabupaten Badung dengan peningkatan setinggi 43,03 persen.

Peningkatan yang terjadi pada realisasi pendapatan maupun realisasi belanja daerah pada tahun 2022 merupakan dampak dari mulai pulihnya ekonomi pasca pandemi virus Covid-19. Kondisi kegiatan pariwisata yang mulai berangsur normal mengakibatkan pendapatan pemerintah dari sektor ini mengalami peningkatan. Selain itu, adanya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan berskala internasional dan nasional di Bali membantu proses pemulihan ekonomi di Bali. Membaiknya kondisi perekonomian Bali membuat pemerintah dapat menggelontorkan anggaran yang lebih banyak untuk belanja daerah.

3.2. PENDAPATAN DAERAH

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat desentralisasi fiskal, yang dalam hal ini dimaksudkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur keuangan daerahnya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk menggali potensi sumber – sumber pendapatan daerahnya dengan memungut pajak dan retribusi daerah ataupun tambahan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Namun demikian, mengingat adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah sebagai tambahan pendapatan daerah.



Gambar 3.4. Derajat Desentralisasi Fiskal menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (persen), 2021-2022

Dalam pengukuran desentralisasi fiskal dapat dilakukan melalui penghitungan derajat desentralisasi fiskal, yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004). Semakin besar derajat desentralisasi fiskal suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah tersebut dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Rata-rata derajat desentralisasi fiskal tahun 2021 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali sebesar 27,14 persen sedangkan pada tahun 2022 sebesar 31,43 persen atau terjadi peningkatan sebesar 15,79 persen poin. Jika dilihat lebih rinci seperti gambar 3.4, rasio PAD terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2022 paling besar tercatat di Kabupaten Badung, yaitu 80,39 persen, disusul Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar dengan nilai rasio masing-masing sebesar 42,16 persen dan 40,97 persen. Sementara itu, derajat desentralisasi paling rendah tercatat di Kabupaten Bangli dengan rasio sebesar 13,03 persen.

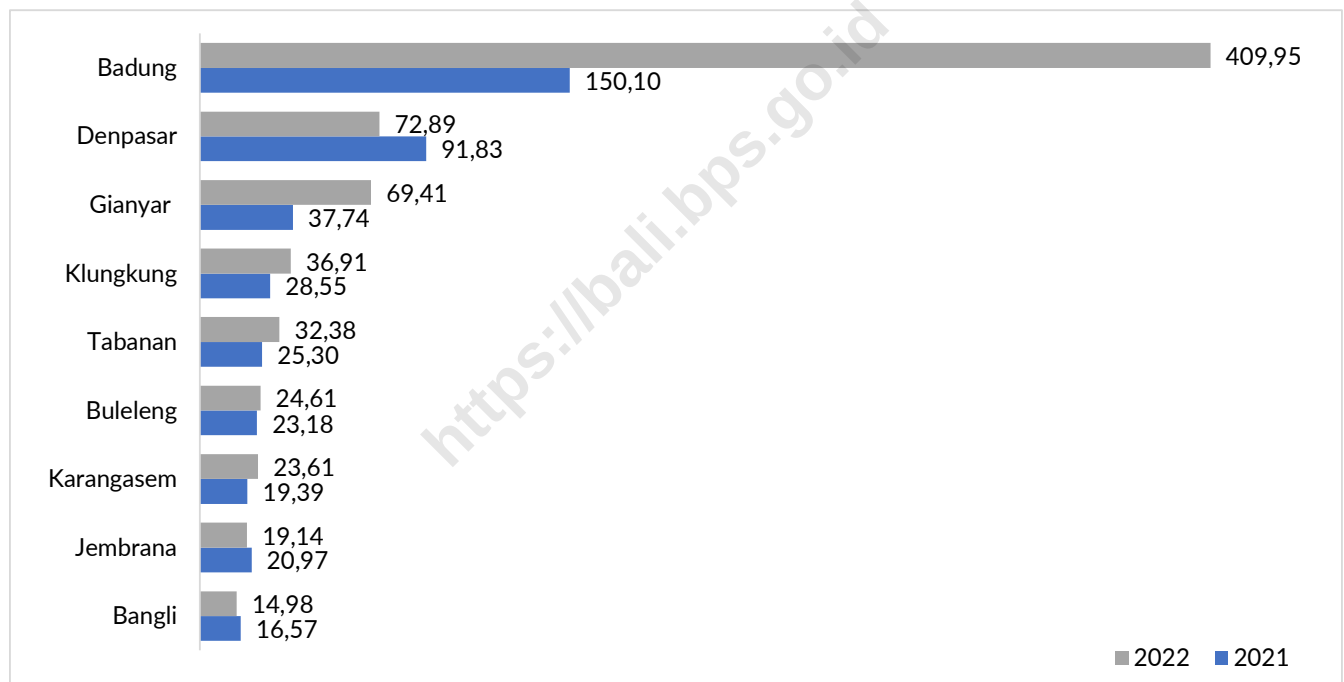
Berdasarkan hasil penelitian Tim Litbang Depdagri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai pengelompokan nilai derajat desentralisasi, dapat dilihat bahwa Kabupaten Badung termasuk memiliki kemampuan desentralisasi yang sangat baik. Derajat desentralisasi Kota Denpasar masih bertahan dalam kategori baik pada tahun 2021 dan 2022, sedangkan Kabupaten Gianyar meningkat dari sebelumnya kategori sedang pada tahun 2021 menjadi kategori baik pada tahun 2022. Kategori desentralisasi fiskal Kabupaten Klungkung dan Tabanan masih bertahan pada kategori cukup pada tahun 2021 dan 2022. Sementara itu, derajat desentralisasi Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Bangli termasuk

Tabel 3.2. Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (persen), 2020-2022

Indikator (persen)	2020	2021	2022
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	40,99	44,26	69,71
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	51,61	77,64	154,38

dalam kategori kurang dengan nilai rasio antara 10,1 persen - 20 persen.

Apabila dilihat dari rasio komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan lain yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah lainnya, dan pinjaman, maka akan terlihat tingkat kemandirian keuangan daerah masing-masing kabupaten/kota. Rasio ini merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Bisma, 2010). Berikut disajikan rasio kemandirian keuangan



Gambar 3.5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (persen), 2021-2022

daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bali (Gambar 3.5).

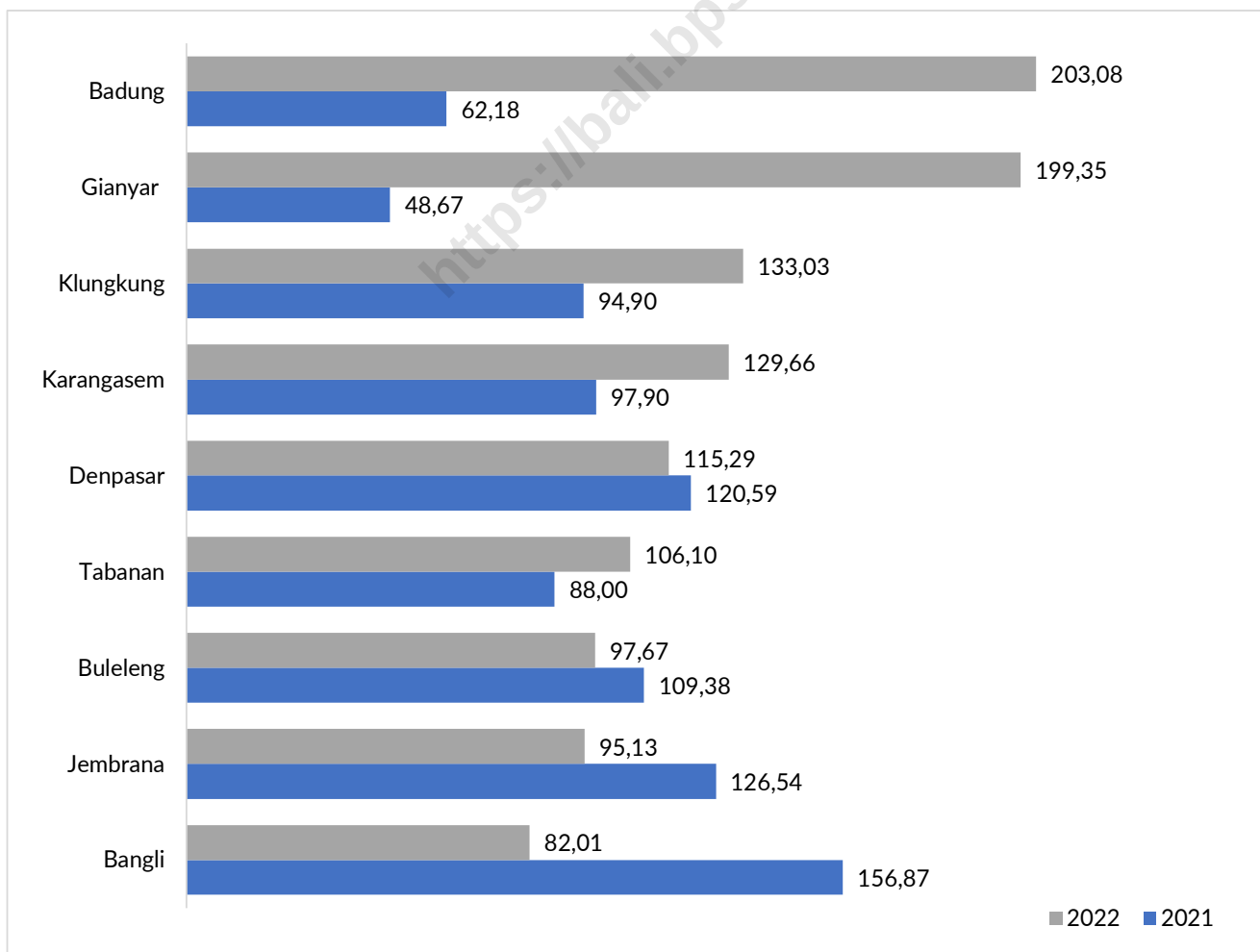
Pada periode 2021-2022, rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bali berada dibawah angka 50 persen. Pada tahun 2022, rasio tersebut naik menjadi 69,71 dari kondisi sebelumnya sebesar 44,26 persen. Dilihat per kabupaten/kota, sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Bali sebenarnya memiliki rasio kemandirian keuangan di bawah 50 persen. Rasio yang tinggi pada level provinsi ditopang oleh PAD Kabupaten Badung yang melebihi 100 persen. Berikut disajikan rasio kemandirian keuangan daerah menurut kabupaten/kota se-Provinsi Bali pada tahun 2020-2022 (Gambar 3.5).

Pada tahun 2022, kemandirian keuangan pada sebagian besar kabupaten/kota di

Bali telah menunjukkan tren positif. Enam kabupaten/kota mengalami peningkatan, dengan peningkatan rasio kemandirian tertinggi terjadi di Kabupaten Badung. Rasio kemandirian Kabupaten Badung pada tahun 2022 sebesar 409,95 persen, naik 173,12 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Jembrana menjadi kabupaten yang mengalami penurunan rasio kemandirian dibandingkan tahun 2021.

Dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali, hanya 3 kabupaten/kota yang benar-benar memiliki rasio kemandirian keuangan daerah di atas 50 persen pada tahun 2022, yaitu kabupaten Badung (409,95 persen), Kota Denpasar (72,89 persen), dan Kabupaten Gianyar (69,41 persen). Kabupaten Klungkung berada pada posisi keempat, yang memiliki rasio kemandirian sebesar 36,91 persen pada tahun 2022, diikuti Kabupaten Tabanan dengan rasio kemandirian sebesar 32,38 persen. Sementara itu, kabupaten lainnya hanya memiliki rasio PAD terhadap pendapatan lainnya antara 10-30 persen. Nilai rasio kemandirian yang masih rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar pemerintah kabupaten di Bali masih sangat bergantung dengan sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah daerah lainnya untuk mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya.

Mengingat peran PAD yang merupakan salah satu komponen dalam menilai



Gambar 3.6. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (persen), 2021-2022

kemandirian fiskal suatu wilayah, pemerintah daerah diharapkan sedapat mungkin mengelola PAD wilayahnya secara efektif dan efisien serta mampu menggali sumber-sumber pendapatan baru untuk meningkatkan nilai PAD di wilayahnya. Berikut disajikan rasio antara realisasi PAD terhadap target PAD yang sudah direncanakan sebelumnya pada Tabel 3.2. Rasio tersebut dapat menunjukkan seberapa efektif upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah disusun sebelumnya. Rasio ini juga dikenal dengan istilah efektivitas keuangan daerah. Pada tahun 2022, rasio efektivitas tercatat 154,38 persen, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 57,64 persen. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah kabupaten/kota di Bali telah mampu merealisasikan PAD-nya sesuai target yang telah direncanakan.

Jika dilihat menurut wilayah kabupaten/kota pada periode 2022 seperti tertuang pada gambar 3.6, rasio efektivitas paling tinggi dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan nilai rasio sebesar 203,08 persen, atau naik 226,61 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Sementara itu, rasio paling rendah terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bangli dengan realisasi PAD terhadap target PAD sebesar 82,01 persen. Rasio ini turun sedalam 47,72 poin dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 156,87 persen.

Jika dilakukan penilaian dengan menggunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka pada tahun 2021 terdapat 4 kabupaten/kota yang sangat efektif mengelola PAD-nya, dan 1 kabupaten/kota yang tidak efektif dalam mengelola PAD. Pada tahun 2022, enam kabupaten/kota memenuhi kriteria sangat efektif dalam pengelolaan PAD, 2 kabupaten/kota memenuhi kriteria efektif, dan hanya 1 kabupaten/kota yang dinilai sebagai cukup efektif dalam mengelola PAD-nya.

Kondisi pada tahun 2021 merupakan kondisi yang tidak normal, sama seperti tahun 2020, akibat adanya wabah pandemi covid-19 sehingga pencapaian PAD kabupaten/kota mengalami hambatan, khususnya kabupaten yang merupakan wilayah sentra pariwisata. Pada tahun 2022, ekonomi telah mulai pulih pasca pandemi dan sektor pariwisata kembali tumbuh seiring dengan mulai dibukanya pembatasan perjalanan yang diberlakukan negara-negara di dunia dan diselenggarakannya kegiatan-kegiatan berskala internasional dan nasional.

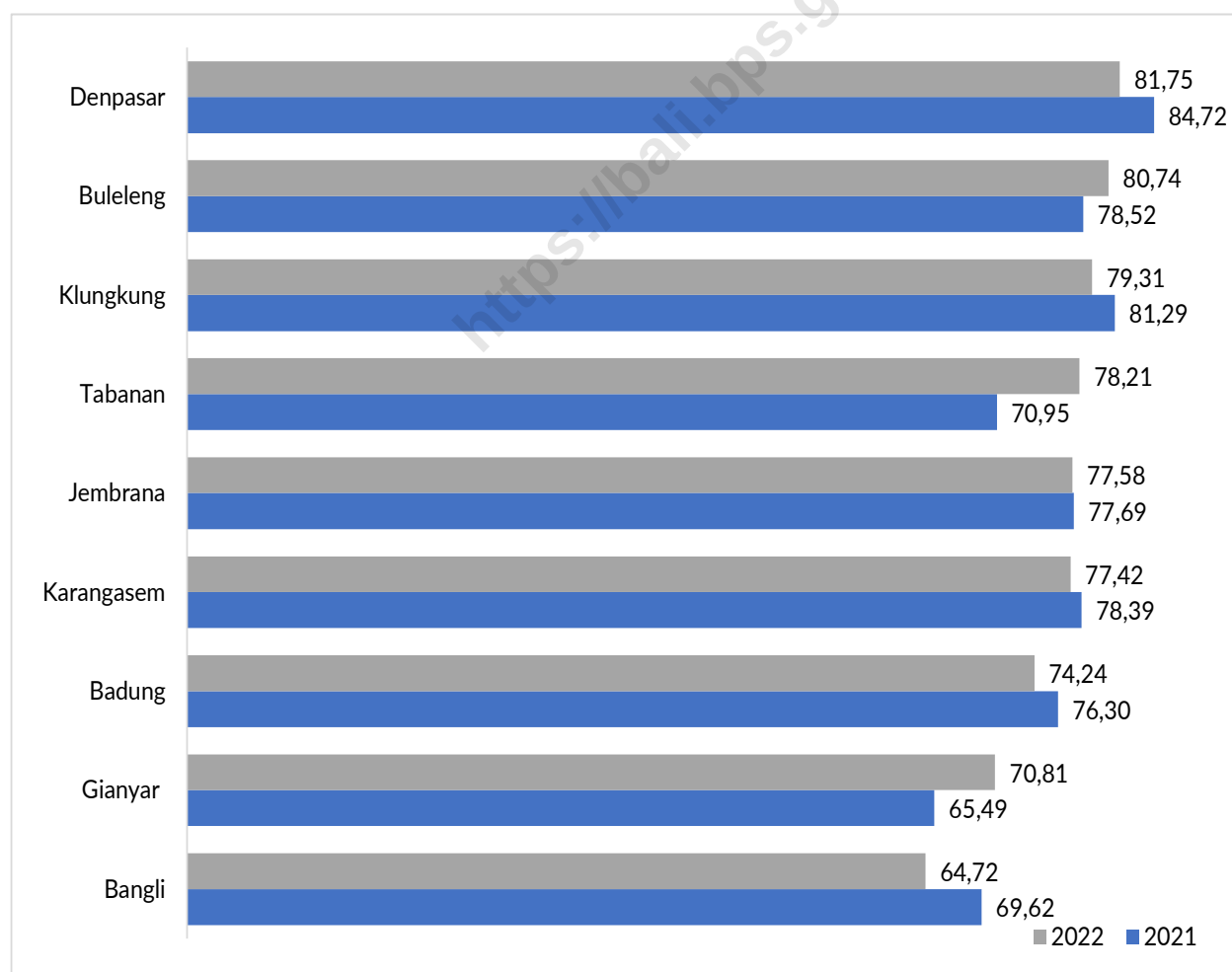
3.3. BELANJA DAERAH

Desentralisasi fiskal yang berlaku sampai saat ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan daerah ke dalam belanja daerah sesuai dengan program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah, di samping memiliki hubungan dengan kualitas pelayanan publik di daerah bersangkutan juga merupakan stimulus bagi pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. Struktur belanja suatu daerah dapat memperlihatkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama pembangunan di daerah tersebut.

Tabel 3.3. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja, Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja, dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah se-Provinsi Bali (persen), 2020-2022

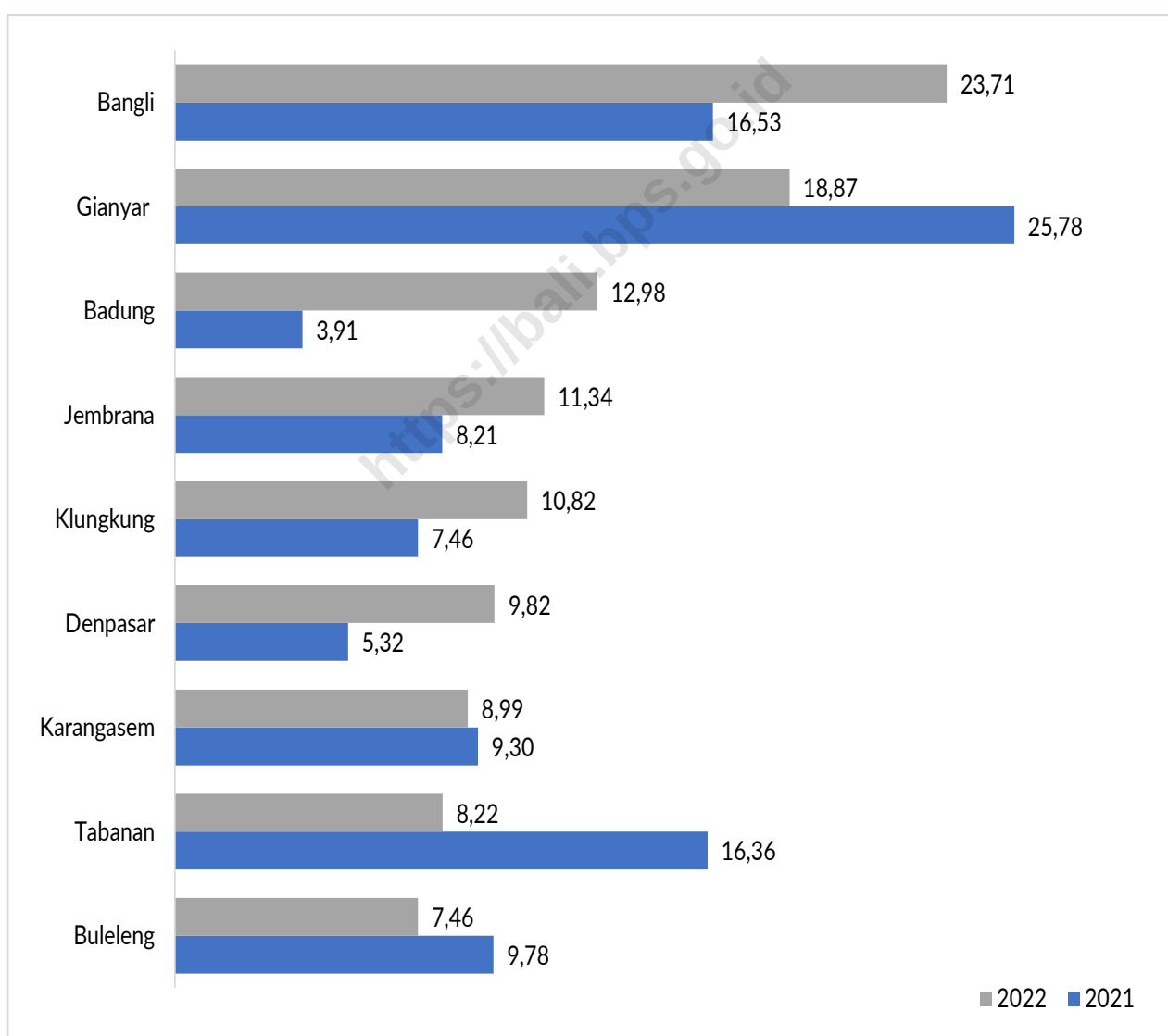
Indikator (persen)	2020	2021	2022
Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja	76,36	75,85	76,12
Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja	10,72	11,21	12,31
Rasio Efisiensi Belanja Daerah	74,51	85,90	103,08

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2020-2022 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, belanja daerah masih tercatat cukup didominasi oleh belanja operasi. Pada tahun 2020, persentase belanja operasi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali mencapai 76,36 persen. Rasio belanja operasi terhadap total belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2021 menurun menjadi 75,85 persen. Sementara itu, peningkatan rasio belanja terhadap total belanja sebesar 0,36 persen menjadi 76,12 persen terjadi pada tahun 2022.



Gambar 3.7. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Pemerintah menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (persen), 2021-2022

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, pada periode 2022 persentase belanja operasi terhadap total belanja pemerintah paling tinggi tercatat di Denpasar, yaitu sebesar 81,75 persen. Sebagian besar dari belanja yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar digunakan untuk belanja operasi. Sebaliknya, rasio ini tercatat paling rendah di Kabupaten Bangli dengan persentase sebesar 64,72 persen. Rasio belanja operasi terhadap total belanja keuangan daerah tercatat mengalami penurunan pada sebagian besar pemerintah kabupaten/kota dibandingkan dengan kondisi tahun 2020. Hanya Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 tercatat mengalami kenaikan rasio belanja operasi terhadap total belanja dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan rasio paling besar terjadi pada Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan rasio belanja operasi terhadap total belanjanya yang meningkat dari 70,95 persen menjadi 78,21 persen. Rasio belanja operasi terhadap total belanja menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 3.7.



Gambar 3.8. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Pemerintah menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (persen), 2021-2022

Selain belanja operasi, pemerintah juga melakukan belanja modal. Belanja modal pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan dalam memicu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Belanja modal bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik sehingga diharapkan mampu menstimulus perekonomian di daerah bersangkutan. Belanja modal merupakan investasi pemerintah daerah yang diharapkan memberikan ~~manfaat~~ ^{manfaat} bagi masyarakat di daerah tersebut. Salah satu bentuk dari belanja modal oleh pemerintah daerah, yaitu pembangunan infrastruktur yang diharapkan akan mendorong dan meningkatkan iklim investasi di daerah bersangkutan, sehingga kegiatan ekonomi di daerah tersebut akan dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

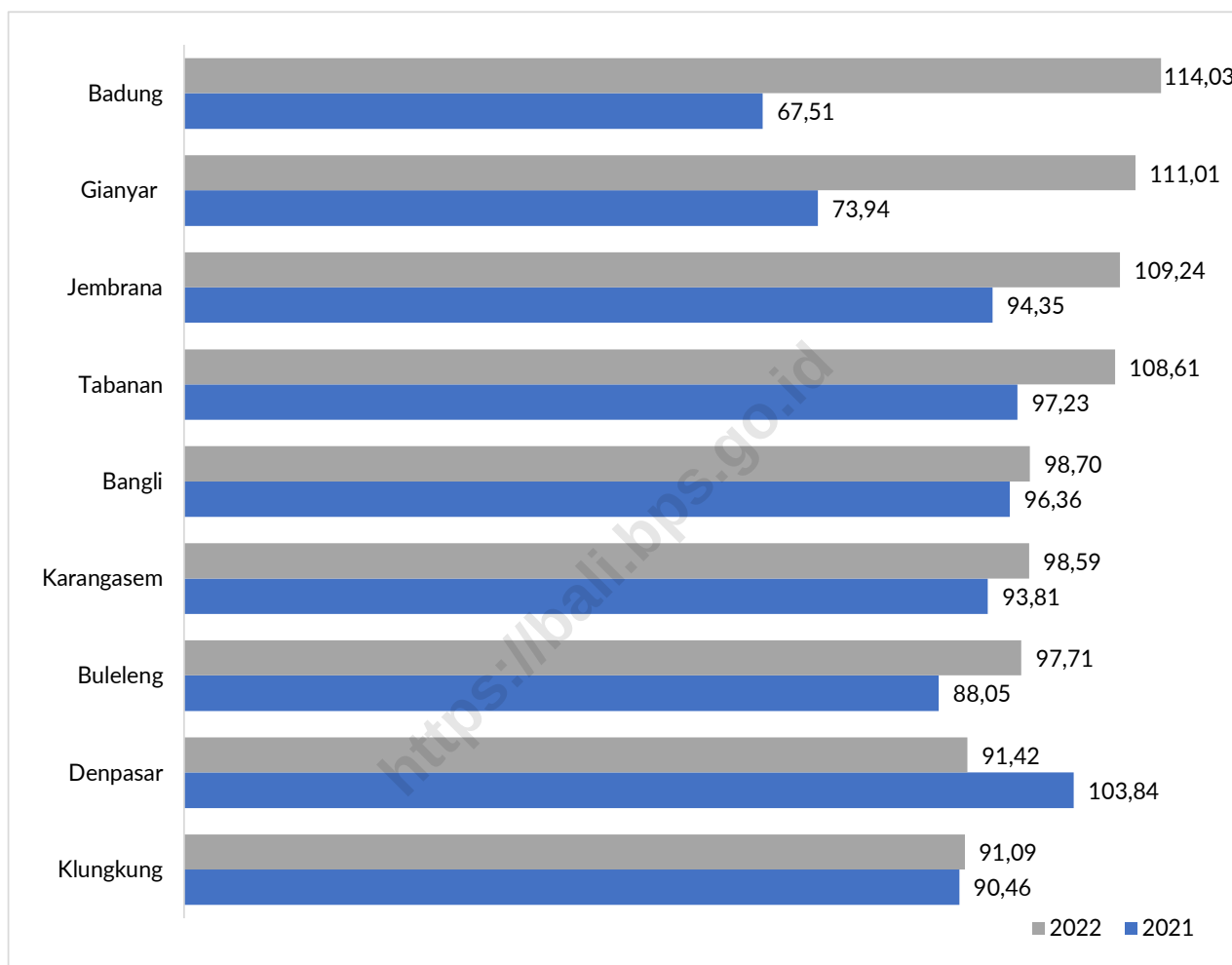
Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Semakin tinggi nilai rasionya maka diharapkan semakin tinggi pula dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Rasio belanja modal terhadap total belanja untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali terus meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2022, namun dengan nilai rasio yang di bawah 20 persen. Peningkatan rasio belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2022 sebesar 9,80 persen poin dari 11,21 pada tahun 2021 menjadi 12,31 persen (tabel 3.3).

Perbandingan nilai belanja modal dibanding total belanja daerah pada masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bali Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada gambar 3.8. Tahun 2022, pemerintah daerah kabupaten/kota dengan rasio belanja modal terhadap total belanja yang paling besar tercatat di Kabupaten Bangli sebesar 23,71 persen, sedangkan yang paling kecil tercatat di Kabupaten Buleleng sebesar 7,46 persen. Lima dari sembilan kabupaten/kota mengalami peningkatan rasio belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2022. Pertumbuhan rasio belanja modal tertinggi terjadi di Kabupaten Badung yang mencapai 231,52 persen. Disisi lain, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng tercatat mengalami penurunan. Penurunan terdalam terjadi di Kabupaten Tabanan sebesar -49,75 persen poin, dari 16,36 persen pada tahun 2021 menjadi 8,22 persen pada tahun 2022.

Mengingat terbatasnya anggaran yang dimiliki, pemerintah kabupaten/kota dalam merealisasikan belanja harus dilakukan sesuai dengan perencanaan awal, apalagi ditengah masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Efisiensi belanja pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat melalui rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja yang direncanakan. Melalui rasio ini, tingkat penghematan anggaran pemerintah kabupaten/kota dapat diukur. Rasio efisiensi belanja pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Bali selalu meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Pada tahun 2022, rasio efisiensi belanja pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Bali tercatat sebesar 103,08 persen, lebih tinggi 38,35 persen poin dibandingkan tahun 2021 .

Dilihat per kabupaten/kota, rasio efisiensi belanja tertinggi dicapai oleh Kabupaten Badung dengan nilai rasio sebesar 114,03 atau naik 68,92 persen poin dibandingkan tahun

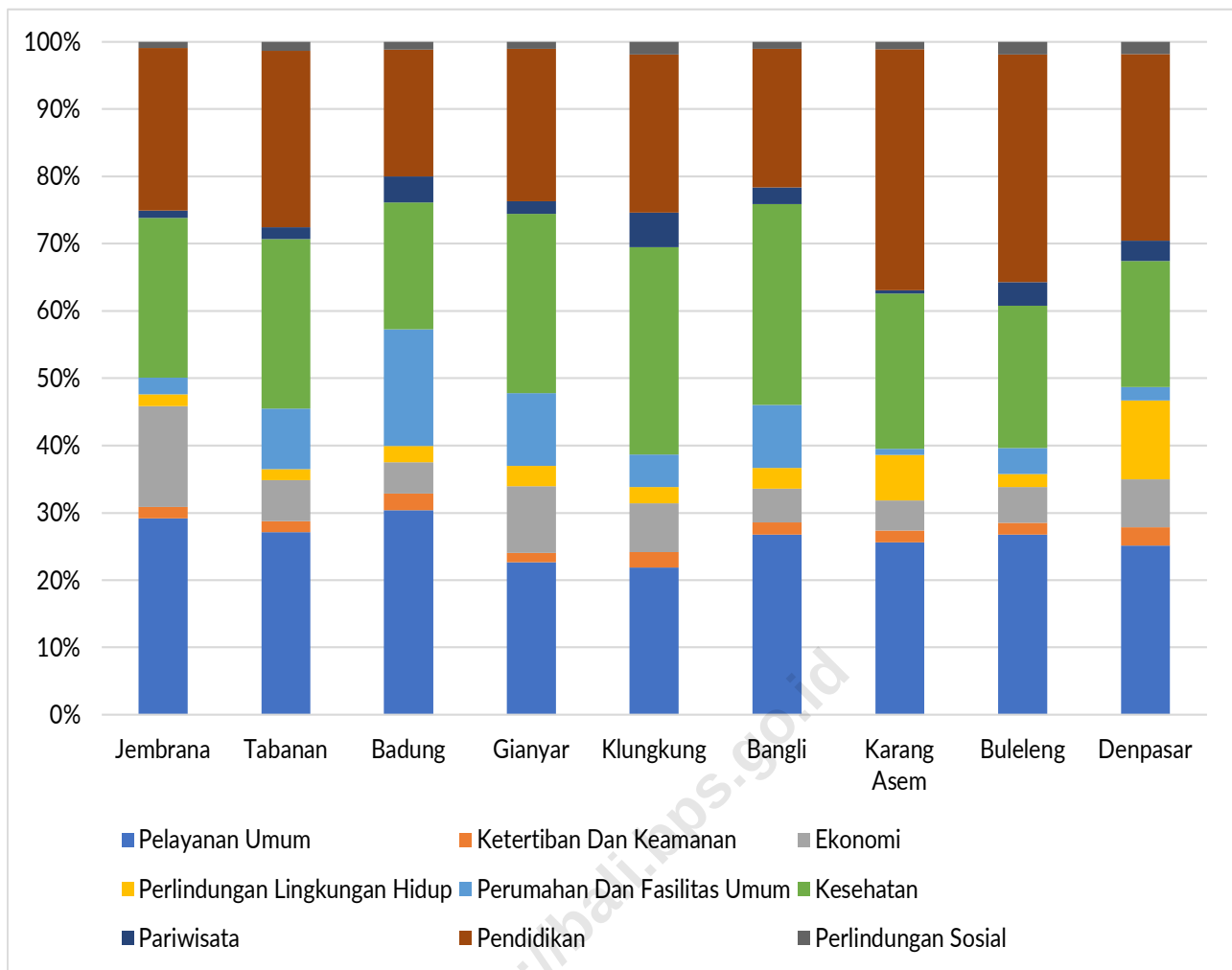
2021. Sementara itu, rasio efisiensi belanja terendah dicapai oleh Kabupaten Klungkung, sebesar 91,09 persen, lebih tinggi 0,70 persen poin dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan kriteria pada penelitian Sholikhah dan Priyono (2022), didapatkan bahwa lima dari sembilan kabupaten/kota di Bali dianggap berhasil melakukan efisiensi anggaran, sedangkan empat kabupaten/kota lainnya dengan rasio efisiensi lebih dari 100 persen dianggap tidak efisien dalam penyerapan anggaran.



Gambar 3.9. Rasio Efisiensi Belanja Daerah menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (persen), 2021-2022

Belanja pemerintah pada APBD dikategorikan pula menurut fungsinya. Belanja menurut fungsi dapat digunakan untuk melihat sektor mana yang menjadi fokus pembangunan pemerintah kabupaten/kota setiap periodenya. Belanja pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali pada tahun 2022 didominasi untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan umum, pendidikan, dan kesehatan.

Setiap kabupaten/kota memiliki prioritas kebijakan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Pada tahun 2022, belanja pelayanan umum memiliki persentase tertinggi terhadap total belanja pada tiga kabupaten/kota di Provinsi Bali, diantaranya Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Badung. Di antara tiga kabupaten tersebut, Kabupaten



Gambar 3.10. Belanja Pemerintah menurut Fungsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali (persen), 2022

Badung merupakan kabupaten dengan persentase belanja pelayanan umum tertinggi yang mencapai 30,40 persen dari total belanja. Sementara itu, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Bangli pada tahun 2022 masih memfokuskan belanja pada fungsi kesehatan dengan persentase terbesar dialokasikan oleh Kabupaten Klungkung sebesar 30,89 persen. Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kota Denpasar tercatat lebih memfokuskan belanjanya pada fungsi pendidikan. Di antara ketiga kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Karangasem tercatat mengalokasikan persentase belanja terbesar pada fungsi ini, sebesar 35,77 persen. Sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalokasikan persentase belanja terkecil pada fungsi perlindungan sosial, hanya Kabupaten Karangasem yang tercatat mengalokasikan persentase belanja terkecil pada fungsi pariwisata.

LAMPIRAN

Tabel 1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jemberana, 2020-2022 (000 Rp)

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	1.235.284.907	1.070.906.207	1.067.224.614
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	141.545.522	146.206.849	185.004.035
1.1	Pajak Daerah	43.982.006	40.982.006	38.129.903
1.2	Retribusi Daerah	16.125.280	16.035.432	8.483.625
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.192.679	9.192.679	9.665.377
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	75.245.558	79.996.732	128.725.130
2	Pendapatan Transfer	1.063.496.585	866.066.814	841.856.179
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	849.868.740	736.153.756	736.019.995
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	213.627.845	129.913.058	105.836.184
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	30.242.800	58.632.544	40.364.399
3.1	Pendapatan Hibah	30.242.800	30.242.800	0
3.2	Dana Darurat	0	0	0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	28.389.744	40.364.399

lanjutan Tabel 1

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	1.265.820.889	1.098.015.500	1.035.976.510
1	Belanja Operasi	954.299.152	878.744.407	804.926.304
1.1	Belanja Pegawai	443.070.324	465.003.430	406.489.257
1.2	Belanja Barang dan Jasa	444.871.949	384.799.432	374.273.560
1.3	Belanja Bunga	0	0	0
1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
1.5	Belanja Hibah	61.476.182	16.196.866	12.924.703
1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.880.698	12.744.679	11.238.783
2	Belanja Modal	175.368.658	82.211.453	85.002.360
2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	0
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.170.133	11.154.987	29.477.040
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.594.394	37.983.041	26.856.777
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	118.562.230	20.537.948	20.408.015
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.041.901	12.535.478	8.216.528
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	0	44.000
3	Belanja Tidak Terduga	400.000	6.228.143	12.375.465
3.1	Belanja Tidak Terduga	400.000	6.228.143	12.375.465
4	Belanja Transfer	135.753.079	130.831.498	133.672.381
4.1	Belanja Bagi Hasil	17.276.882	17.256.931	17.643.244
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	118.476.197	113.574.567	116.029.137

lanjutan Tabel 1

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	30.535.982	27.109.293	98.359.634
1	Penerimaan Pembiayaan	35.935.982	32.509.293	102.544.634
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.535.982	27.109.293	98.359.634
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	5.400.000	4.185.000
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	5.400.000	5.400.000	4.185.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	5.400.000	4.185.000
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	0	129.607.737

Tabel 2. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan, 2020-2022 (000 Rp)

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	2.114.861.649	1.886.886.751	1.772.217.491
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	450.405.034	411.729.701	411.329.363
1.1	Pajak Daerah	147.327.269	115.763.138	130.763.138
1.2	Retribusi Daerah	27.239.958	46.698.007	22.152.722
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.892.590	10.198.935	9.343.882
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	266.945.217	239.069.621	249.069.621
2	Pendapatan Transfer	1.621.860.815	1.400.768.481	1.360.888.128
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.363.399.680	1.198.685.656	1.209.672.840
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	258.461.135	202.082.825	151.215.288
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	42.595.800	74.388.569	0
3.1	Pendapatan Hibah	42.595.800	42.595.800	0
3.2	Dana Darurat	0	0	0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	31.792.769	0

lanjutan Tabel 2

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	2.179.861.649	1.954.746.492	1.643.563.380
1	Belanja Operasi	1.601.096.873	1.469.108.055	1.289.346.432
1.1	Belanja Pegawai	839.716.908	879.706.585	894.794.976
1.2	Belanja Barang dan Jasa	627.355.665	500.279.870	326.334.322
1.3	Belanja Bunga	0	0	7.968.750
1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
1.5	Belanja Hibah	130.324.300	89.121.600	60.248.384
1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.700.000	0	0
2	Belanja Modal	293.779.508	223.258.457	111.192.030
2.1	Belanja Modal Tanah	256.800	15.000	5.000
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.805.197	62.173.165	19.430.672
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.313.930	62.392.798	46.706.968
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116.230.521	87.588.831	44.044.296
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	173.060	11.088.663	157.976
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	0	847.118
3	Belanja Tidak Terduga	5.236.589	6.727.165	8.689.244
3.1	Belanja Tidak Terduga	5.236.589	6.727.165	8.689.244
4	Belanja Transfer	279.748.679	255.652.815	234.335.674
4.1	Belanja Bagi Hasil	18.117.336	15.446.000	16.141.586
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	261.631.343	240.206.815	218.194.088

lanjutan Tabel 2

	Rincian	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	65.000.000	87.905.026	59.800.000
1	Penerimaan Pembiayaan	75.000.000	93.905.026	60.000.000
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.000.000	93.905.026	60.000.000
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000	6.000.000	200.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	6.000.000	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000	0	200.000
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	20.045.285	188.454.111

Tabel 3. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung, 2020-2022 (000 Rp)

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	6.302.353.216	3.800.966.247	2.732.730.614
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.303.069.995	2.815.021.012	1.824.739.714
1.1	Pajak Daerah	4.760.834.664	2.309.324.005	1.411.363.623
1.2	Retribusi Daerah	159.253.481	116.266.604	40.688.046
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	186.841.203	167.247.348	165.971.026
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	196.140.647	222.183.055	206.717.019
2	Pendapatan Transfer	925.285.021	801.493.850	907.990.900
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	738.022.184	650.940.193	754.953.493
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	187.262.837	150.553.657	153.037.407
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	73.998.200	184.451.385	0
3.1	Pendapatan Hibah	73.998.200	80.283.600	0
3.2	Dana Darurat	0	0	0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	0	104.167.785	0

lanjutan Tabel 3

	Rincian	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	6.302.353.216	3.800.966.247	3.218.358.767
1	Belanja Operasi	4.036.162.682	3.203.993.413	2.492.031.745
1.1	Belanja Pegawai	1.424.518.223	1.581.062.479	1.168.666.835
1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.197.474.126	1.316.981.257	1.088.379.344
1.3	Belanja Bunga	11.441.488	0	16.307.362
1.4	Belanja Subsidi	0	160.000	2.282.650
1.5	Belanja Hibah	103.794.845	246.992.214	189.506.054
1.6	Belanja Bantuan Sosial	298.934.000	58.797.463	26.889.500
2	Belanja Modal	1.255.478.434	140.088.121	377.066.205
2.1	Belanja Modal Tanah	150.955.945	0	0
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	314.774.137	110.007.607	17.494.614
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	578.930.337	3.695.627	307.747.992
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	194.652.466	22.840.644	37.099.526
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.165.549	3.544.243	14.724.073
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	0	0
3	Belanja Tidak Terduga	15.000.000	49.590.434	70.976.686
3.1	Belanja Tidak Terduga	15.000.000	49.590.434	70.976.686
4	Belanja Transfer	995.712.100	407.294.279	278.284.131
4.1	Belanja Bagi Hasil	632.748.815	308.044.444	182.615.113
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	362.963.285	99.249.836	95.669.018

lanjutan Tabel 3

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	0	0	263.446.874
1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	263.446.874
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	0	0
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	263.446.874
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	0	-222.181.279

Tabel 4. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar, 2020-2022 (000 Rp)

	Rincian	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	2.549.320.887	2.059.044.819	1.569.948.579
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.230.253.247	883.797.648	430.172.109
1.1	Pajak Daerah	888.016.521	619.970.944	241.676.178
1.2	Retribusi Daerah	114.832.293	35.420.032	16.054.256
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.820.621	9.820.622	9.526.579
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	217.583.812	218.586.050	162.915.096
2	Pendapatan Transfer	1.264.710.650	1.079.777.509	1.069.631.880
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.120.118.366	944.837.300	971.129.622
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.592.284	134.940.209	98.502.258
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	54.356.990	95.469.662	70.144.590
3.1	Pendapatan Hibah	54.356.990	55.316.990	70.144.590
3.2	Dana Darurat	0	0	0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	40.152.672	0

lanjutan Tabel 4

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	3.039.895.664	2.572.304.932	1.902.066.110
1	Belanja Operasi	1.731.875.614	1.602.385.414	1.245.699.258
1.1	Belanja Pegawai	851.543.800	722.105.764	671.982.348
1.2	Belanja Barang dan Jasa	717.388.727	669.512.677	505.662.270
1.3	Belanja Bunga	6.500.000	0	12.008.499
1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
1.5	Belanja Hibah	121.943.787	192.388.920	50.164.881
1.6	Belanja Bantuan Sosial	34.499.300	18.378.053	5.881.260
2	Belanja Modal	976.517.804	743.864.573	490.427.419
2.1	Belanja Modal Tanah	39.758.000	20.582.760	10.923.930
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.645.527	74.300.121	65.663.538
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	722.236.571	467.612.775	321.325.770
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.204.590	168.947.741	80.758.789
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.673.116	12.421.176	11.755.392
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	0	0
3	Belanja Tidak Terduga	700.000	700.000	10.743.150
3.1	Belanja Tidak Terduga	700.000	700.000	10.743.150
4	Belanja Transfer	330.802.246	225.354.945	155.196.282
4..1	Belanja Bagi Hasil	139.430.197	53.521.743	11.285.518
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	191.372.049	171.833.202	143.910.764

lanjutan Tabel 4

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	490.574.777	591.937.923	357.210.533
1	Penerimaan Pembiayaan	570.633.777	712.437.465	401.229.026
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	361.276.541	126.041.160	20.494.471
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	209.357.236	586.396.305	380.734.555
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	80.059.000	120.499.542	44.018.493
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	42.559.000	32.999.542	6.518.493
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	37.500.000	87.500.000	37.500.000
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	78.677.810	25.093.002

Tabel 5. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung, 2020-2022 (000 Rp)

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	1.248.245.872	1.184.743.188	1.064.854.628
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	248.625.466	268.171.895	232.629.373
1.1	Pajak Daerah	77.473.117	52.780.615	37.543.654
1.2	Retribusi Daerah	53.614.583	37.231.638	21.947.788
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.143.452	8.004.000	8.004.000
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	109.394.314	170.155.642	165.133.931
2	Pendapatan Transfer	976.740.405	833.076.188	832.225.255
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	812.401.621	732.496.648	744.562.652
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	164.338.784	100.579.540	87.662.603
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	22.880.000	83.495.105	0
3.1	Pendapatan Hibah	22.880.000	23.226.280	0
3.2	Dana Darurat	0	0	0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	60.268.825	0

lanjutan Tabel 5

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	1.354.388.869	1.275.905.143	1.327.433.540
1	Belanja Operasi	1.032.245.019	994.797.534	989.424.382
1.1	Belanja Pegawai	531.011.828	585.454.576	553.757.552
1.2	Belanja Barang dan Jasa	467.713.291	255.881.883	365.652.741
1.3	Belanja Bunga	2.000.000	0	4.960.213
1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
1.5	Belanja Hibah	29.753.312	141.099.326	59.405.276
1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.766.588	12.361.749	5.648.600
2	Belanja Modal	189.698.238	337.331.976	206.568.563
2.1	Belanja Modal Tanah	2.250.000	0	100.000
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.960.761	39.898.596	55.594.858
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.504.042	0	57.651.965
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.280.835	182.546.658	85.368.286
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.702.600	114.886.722	20.000
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	0	7.833.454
3	Belanja Tidak Terduga	500.000	6.000.000	20.996.817
3.1	Belanja Tidak Terduga	500.000	6.000.000	20.996.817
4	Belanja Transfer	131.945.611	52.657.265	110.443.778
4.1	Belanja Bagi Hasil	12.306.931	0	5.905.329
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	119.638.680	52.657.265	104.538.449

lanjutan Tabel 5

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	106.142.997	295.851.715	263.017.075
1	Penerimaan Pembiayaan	107.842.997	295.851.715	263.017.075
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	82.092.997	166.963.340	155.356.063
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	25.000.000	128.138.375	107.661.012
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	750.000	750.000	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	1.700.000	0	0
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	1.700.000	0	0
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	204.689.760	438.163

Tabel 6. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli, 2020-2022 (000 Rp)

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	1.200.638.485	1.152.717.684	1.145.838.600
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	165.275.262	104.247.611	175.595.058
1.1	Pajak Daerah	25.796.372	15.736.500	17.381.650
1.2	Retribusi Daerah	45.506.607	17.811.893	21.989.620
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.895.083	4.563.934	5.020.328
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	89.077.200	66.135.284	131.203.460
2	Pendapatan Transfer	970.302.099	926.133.886	959.727.753
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	823.871.596	819.253.291	818.733.307
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	146.430.503	106.880.595	140.994.446
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	65.061.124	122.336.187	10.515.789
3.1	Pendapatan Hibah	32.408.200	32.748.000	0
3.2	Dana Darurat	0	0	0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.652.924	89.588.187	10.515.789

lanjutan Tabel 6

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	1.233.885.965	1.150.716.684	1.256.239.014
1	Belanja Operasi	883.034.164	827.519.966	812.453.847
1.1	Belanja Pegawai	523.459.702	545.847.203	541.299.596
1.2	Belanja Barang dan Jasa	316.626.552	275.450.167	257.853.539
1.3	Belanja Bunga	0	0	4.845.729
1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
1.5	Belanja Hibah	42.767.710	5.974.900	8.193.787
1.6	Belanja Bantuan Sosial	180.200	247.696	261.196
2	Belanja Modal	149.904.993	164.236.159	302.302.851
2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	14.393.673
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.589.290	26.786.097	62.122.899
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.741.455	37.830.235	180.401.722
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.803.297	97.161.070	44.420.629
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.770.951	2.458.757	963.928
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	0	0
3	Belanja Tidak Terduga	1.000.000	6.000.000	5.250.000
3.1	Belanja Tidak Terduga	1.000.000	6.000.000	5.250.000
4	Belanja Transfer	199.946.808	152.960.559	136.232.316
4.1	Belanja Bagi Hasil	7.130.298	3.376.394	3.937.127
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	192.816.510	149.584.165	132.295.189

lanjutan Tabel 6

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	33.247.480	0	116.316.070
1	Penerimaan Pembiayaan	33.247.480	0	118.316.070
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	33.247.480	0	54.000.000
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	64.316.070
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	2.000.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	0	0	2.000.000
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	2.001.000	5.915.656

Tabel 7. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem, 2020-2022 (000 Rp)

	Rincian	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	1.633.938.696	1.601.867.550	1.545.248.459
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	259.456.398	258.110.009	232.405.767
1.1	Pajak Daerah	128.829.394	124.436.803	118.330.510
1.2	Retribusi Daerah	26.571.486	15.925.536	14.195.190
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.055.641	11.260.598	9.099.898
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	92.999.877	106.487.072	90.780.170
2	Pendapatan Transfer	1.317.610.198	1.228.558.888	1.278.690.892
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.148.291.249	1.084.787.515	1.098.924.793
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	169.318.949	143.771.373	179.766.099
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	56.872.100	115.198.653	34.151.801
3.1	Pendapatan Hibah	56.872.100	56.872.100	0
3.2	Dana Darurat	0	0	0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	58.326.553	34.151.801

lanjutan Tabel 7

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	1.713.278.926	1.645.990.787	1.570.990.859
1	Belanja Operasi	1.277.602.787	1.223.148.885	1.208.811.753
1.1	Belanja Pegawai	741.356.044	762.640.534	770.400.046
1.2	Belanja Barang dan Jasa	480.529.489	427.447.043	412.611.833
1.3	Belanja Bunga	100.000	0	0
1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
1.5	Belanja Hibah	53.867.255	19.642.908	18.029.473
1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.750.000	13.418.400	7.770.400
2	Belanja Modal	226.509.441	212.702.104	144.672.530
2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	0
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.661.446	26.062.681	19.994.303
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	33.800.715	34.183.891
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.248.742	99.074.138	85.251.855
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	83.599.254	53.764.570	5.242.481
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	0	0
3	Belanja Tidak Terduga	1.000.000	10.274.794	10.788.533
3.1	Belanja Tidak Terduga	1.000.000	10.274.794	10.788.533
4	Belanja Transfer	208.166.697	199.865.004	206.718.042
4.1	Belanja Bagi Hasil	20.202.114	18.247.104	17.229.341
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	187.964.583	181.617.900	189.488.701

lanjutan Tabel 7

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	79.340.230	44.123.242	47.526.863
1	Penerimaan Pembiayaan	79.485.230	48.123.242	50.026.863
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	79.485.230	48.123.242	50.026.863
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	145.000	4.000.000	2.500.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	0	4.000.000	2.500.000
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	145.000	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	5	21.784.464

Tabel 8. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng, 2020-2022 (000 Rp)

	Rincian	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	2.320.776.328	2.174.144.303	2.079.345.283
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	402.217.905	358.379.886	420.379.885
1.1	Pajak Daerah	181.400.000	145.676.580	157.676.580
1.2	Retribusi Daerah	30.297.880	27.248.783	47.248.782
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.650.000	19.822.033	19.822.033
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	173.870.025	165.632.490	195.632.490
2	Pendapatan Transfer	1.829.756.823	1.561.060.059	1.658.965.398
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.503.414.022	1.293.619.530	1.492.900.225
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	326.342.801	267.440.529	166.065.173
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	88.801.600	254.704.358	0
3.1	Pendapatan Hibah	88.801.600	254.704.358	0
3.2	Dana Darurat	0	0	0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0

lanjutan Tabel 8

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	2.347.215.828	2.351.358.631	2.128.585.072
1	Belanja Operasi	1.721.637.564	1.736.568.610	1.688.795.679
1.1	Belanja Pegawai	882.243.800	908.860.778	914.174.772
1.2	Belanja Barang dan Jasa	769.172.464	753.944.126	705.707.636
1.3	Belanja Bunga	0	0	0
1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
1.5	Belanja Hibah	64.166.200	65.184.466	63.595.771
1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.055.100	8.579.240	5.317.500
2	Belanja Modal	351.267.027	363.814.088	179.883.771
2.1	Belanja Modal Tanah	5.447.550	2.115.000	200.000
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.363.971	89.433.173	84.408.984
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	201.083.262	165.477.362	38.555.143
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.261.883	72.981.434	35.842.767
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	31.110.361	33.807.119	20.876.877
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	0	0
3	Belanja Tidak Terduga	17.067.317	5.276.486	9.276.486
3.1	Belanja Tidak Terduga	17.067.317	5.276.486	9.276.486
4	Belanja Transfer	257.243.920	245.699.447	250.629.136
4.1	Belanja Bagi Hasil	21.169.788	17.379.000	20.550.000
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	236.074.132	228.320.447	230.079.136

lanjutan Tabel 8

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	26.439.500	177.214.328	49.239.789
1	Penerimaan Pembiayaan	71.439.500	222.214.328	65.239.789
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.439.500	88.714.328	65.239.789
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	30.000.000	133.500.000	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000	45.000.000	16.000.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000	15.000.000	16.000.000
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.000.000	30.000.000	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	0	0

Tabel 9. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar, 2020-2022 (000 Rp)

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	2.215.091.685	1.787.116.947	3.893.922.745
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	942.366.777	657.068.221	770.293.670
1.1	Pajak Daerah	728.200.000	460.000.000	562.207.740
1.2	Retribusi Daerah	35.622.204	29.630.296	29.154.972
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45.444.311	59.742.952	52.140.472
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	133.100.262	107.694.973	126.790.486
2	Pendapatan Transfer	1.211.289.307	1.002.983.406	1.162.203.954
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.019.959.473	820.075.092	1.008.692.977
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	191.329.834	182.908.314	153.510.977
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	61.435.600	127.065.320	1.961.425.121
3.1	Pendapatan Hibah	61.435.600	61.435.600	0
3.2	Dana Darurat	0	0	1.947.225.121
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	65.629.720	14.200.000

lanjutan Tabel 9

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	2.430.171.685	1.854.295.081	2.214.850.928
1	Belanja Operasi	1.939.909.875	1.594.590.372	1.598.549.010
1.1	Belanja Pegawai	916.978.657	904.819.503	986.911.339
1.2	Belanja Barang dan Jasa	913.451.655	496.664.989	611.637.671
1.3	Belanja Bunga	0	0	0
1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
1.5	Belanja Hibah	105.885.062	190.467.080	0
1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.594.500	2.638.800	0
2	Belanja Modal	288.911.510	82.916.825	230.130.163
2.1	Belanja Modal Tanah	160.125	294.000	241.500
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.888.713	53.693.536	30.844.328
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.208.103	0	109.398.083
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	108.988.403	26.529.565	69.873.016
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.666.166	2.399.724	19.773.236
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	0	0
3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000	12.078.917	223.450.776
3.1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000	12.078.917	223.450.776
4	Belanja Transfer	196.350.300	164.708.967	162.720.980
4.1	Belanja Bagi Hasil	76.382.220	49.500.000	59.220.774
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	119.968.080	115.208.967	103.500.206

lanjutan Tabel 9

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	215.080.000	100.000.000	280.324.870
1	Penerimaan Pembiayaan	222.580.000	100.000.000	280.324.870
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	222.580.000	0	280.324.870
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	100.000.000	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000	0	0
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000	0	0
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	32.821.866	1.959.396.687

Tabel 10. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana, 2020-2022 (000 Rp)

	Rincian	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	1.089.673.620	1.067.224.614	1.095.691.566
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	148.045.103	185.004.035	175.992.613
1.1	Pajak Daerah	34.371.564	38.129.903	48.793.826
1.2	Retribusi Daerah	9.591.529	8.483.625	9.204.968
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.575.922	9.665.377	8.303.445
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	93.506.088	128.725.130	109.690.374
2	Pendapatan Transfer	908.105.548	841.856.179	919.698.953
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	780.912.433	736.019.995	787.808.598
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.193.115	105.836.184	131.890.355
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	33.522.969	40.364.399	0
3.1	Pendapatan Hibah	33.522.969	0	0
3.2	Dana Darurat	0	0	0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	40.364.399	0

lanjutan Tabel 10

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	1.067.104.976	1.036.020.510	1.131.655.988
1	Belanja Operasi	831.300.103	804.926.304	877.968.600
1.1	Belanja Pegawai	370.746.106	406.489.257	426.227.679
1.2	Belanja Barang dan Jasa	399.926.484	374.273.560	400.252.209
1.3	Belanja Bunga	0	0	0
1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
1.5	Belanja Hibah	55.121.946	12.924.703	42.522.017
1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.505.567	11.238.783	8.966.695
2	Belanja Modal	83.291.080	85.046.360	128.377.652
2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	0
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.464.823	29.477.040	30.238.731
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.595.361	26.856.777	39.191.543
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.548.774	20.408.015	54.851.664
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.682.122	8.260.528	3.971.603
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	44.000	124.111
3	Belanja Tidak Terduga	23.739.414	12.375.465	3.495.999
3.1	Belanja Tidak Terduga	23.739.414	12.375.465	3.495.999
4	Belanja Transfer	128.774.379	133.672.381	121.813.737
4..1	Belanja Bagi Hasil	15.975.219	17.643.244	15.849.048
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	112.799.159	116.029.137	105.964.689

lanjutan Tabel 10

	Rincian	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	75.790.990	98.359.634	127.754.747
1	Penerimaan Pembiayaan	78.990.990	102.544.634	134.476.737
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.790.990	98.359.634	129.876.737
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	4.185.000	4.600.000
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.200.000	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	3.200.000	4.185.000	6.721.990
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	0	0	2.121.990
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	3.200.000	4.185.000	4.600.000
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	98.359.634	129.563.737	91.790.325

Tabel 11. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan, 2020-2022 (000 Rp)

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	1.789.669.930	1.794.178.975	1.784.234.201
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	313.042.530	362.314.631	436.408.393
1.1	Pajak Daerah	97.073.955	144.569.471	175.842.676
1.2	Retribusi Daerah	22.808.553	39.449.157	14.607.366
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.285.519	9.280.452	8.208.083
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	182.874.503	169.015.551	237.750.268
2	Pendapatan Transfer	1.420.475.257	1.371.746.823	1.347.825.808
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.249.692.228	1.202.758.157	1.153.687.881
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	170.783.029	168.988.666	194.137.927
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	56.152.143	60.117.521	0
3.1	Pendapatan Hibah	56.152.143	0	0
3.2	Dana Darurat	0	0	0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	60.117.521	0

lanjutan Tabel 11

	Rincian	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	1.772.916.984	1.900.663.089	1.785.089.226
1	Belanja Operasi	1.342.335.144	1.348.532.784	1.396.099.179
1.1	Belanja Pegawai	759.680.177	745.077.210	784.280.457
1.2	Belanja Barang dan Jasa	476.491.596	516.155.426	515.580.417
1.3	Belanja Bunga	0	1.811.416	7.301.022
1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
1.5	Belanja Hibah	102.666.371	85.488.732	88.937.283
1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.497.000	0	0
2	Belanja Modal	184.671.273	310.954.822	146.740.173
2.1	Belanja Modal Tanah	0	7.063	10.251
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.384.302	70.504.222	60.885.599
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.693.797	43.913.000	34.344.799
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.206.374	195.647.130	50.353.760
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.386.800	883.407	345.818
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	0	799.946
3	Belanja Tidak Terduga	15.195.052	821.496	5.479.373
3.1	Belanja Tidak Terduga	15.195.052	821.496	5.479.373
4	Belanja Transfer	230.715.515	240.353.987	236.770.501
4.1	Belanja Bagi Hasil	10.386.570	14.767.227	16.419.513
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	220.328.945	225.586.760	220.350.988

lanjutan Tabel 11

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	14.684.099	148.555.759	41.855.174
1	Penerimaan Pembiayaan	68.934.099	148.555.759	42.055.174
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18.148.759	31.607.291	42.011.563
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	50.250.000	116.948.468	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	43.611
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	535.340	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	54.250.000	0	200.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000	0	200.000
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	50.250.000	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	31.437.045	42.071.645	41.000.149

Tabel 12. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung, 2020-2022 (000 Rp)

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	3.906.157.464	2.916.460.089	4.609.697.096
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.116.974.302	1.750.345.226	3.705.745.447
1.1	Pajak Daerah	1.613.756.252	1.278.719.796	3.210.787.366
1.2	Retribusi Daerah	68.412.916	41.976.477	76.235.413
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	243.081.327	206.671.087	179.845.739
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	191.723.807	222.977.866	238.876.929
2	Pendapatan Transfer	875.264.611	1.075.222.607	898.419.919
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	719.618.724	948.757.752	720.669.606
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	155.645.886	126.464.855	177.750.313
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	913.918.551	90.892.256	5.531.730
3.1	Pendapatan Hibah	913.918.551	203.461	4.904.102
3.2	Dana Darurat	0	0	0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	0	90.688.795	627.628

lanjutan Tabel 12

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	3.877.169.048	2.565.869.909	3.669.879.652
1	Belanja Operasi	3.018.748.417	1.957.708.001	2.724.494.988
1.1	Belanja Pegawai	1.104.941.957	1.074.582.059	1.175.295.300
1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.276.452.897	706.576.309	1.198.418.526
1.3	Belanja Bunga	0	0	0
1.4	Belanja Subsidi	1.121.800	16.000	1.265.758
1.5	Belanja Hibah	586.039.663	176.533.633	348.551.904
1.6	Belanja Bantuan Sosial	50.192.100	0	963.500
2	Belanja Modal	452.909.485	100.428.626	476.196.285
2.1	Belanja Modal Tanah	32.157.600	0	26.335.768
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.091.713	90.679.769	105.556.248
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	246.151.786	221.416	297.327.101
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.852.009	9.527.441	35.962.917
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.656.376	0	11.014.251
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	0	0
3	Belanja Tidak Terduga	114.100.663	280.264.300	25.582.440
3.1	Belanja Tidak Terduga	114.100.663	280.264.300	25.582.440
4	Belanja Transfer	291.410.484	227.468.982	443.605.939
4..1	Belanja Bagi Hasil	234.503.321	129.858.258	294.333.862
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	56.907.163	97.610.724	149.272.077

lanjutan Tabel 12

	Rincian	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	279.401.874	308.167.875	155.624.738
1	Penerimaan Pembiayaan	279.401.874	308.167.875	205.624.738
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	278.775.207	308.161.209	205.624.738
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000	6.667	0
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	126.667	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	50.000.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	0	0	50.000.000
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	308.390.290	658.758.055	1.095.442.182

Tabel 13. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar, 2020-2022 (000 Rp)

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	1.884.736.534	1.569.948.579	2.093.010.626
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	545.869.873	430.172.109	857.553.633
1.1	Pajak Daerah	323.627.900	241.676.178	597.595.753
1.2	Retribusi Daerah	34.693.045	16.054.256	37.958.135
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.198.716	9.526.579	7.945.888
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	174.350.212	162.915.096	214.053.857
2	Pendapatan Transfer	1.140.696.384	1.069.631.880	1.234.601.936
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.021.155.297	971.129.622	1.082.997.076
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	119.541.087	98.502.258	151.604.860
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	198.170.277	70.144.590	855.057
3.1	Pendapatan Hibah	198.170.277	70.144.590	855.000
3.2	Dana Darurat	0	0	0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	57

lanjutan Tabel 13

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	2.092.572.155	1.902.066.110	2.111.421.451
1	Belanja Operasi	1.410.888.342	1.245.699.258	1.495.148.945
1.1	Belanja Pegawai	731.602.900	671.982.348	735.431.103
1.2	Belanja Barang dan Jasa	495.322.823	505.662.270	617.167.975
1.3	Belanja Bunga	7.088.509	12.008.499	12.127.815
1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
1.5	Belanja Hibah	139.400.255	50.164.881	129.227.376
1.6	Belanja Bantuan Sosial	37.473.855	5.881.260	1.194.676
2	Belanja Modal	416.037.115	490.427.419	398.529.833
2.1	Belanja Modal Tanah	595.200	10.923.930	8.517.670
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.720.545	65.663.538	75.164.451
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	275.012.261	321.325.770	260.803.648
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.233.420	80.758.789	47.122.855
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.475.689	11.755.392	6.921.209
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	0	0
3	Belanja Tidak Terduga	56.827.848	10.743.150	1.641.458
3.1	Belanja Tidak Terduga	56.827.848	10.743.150	1.641.458
4	Belanja Transfer	208.818.850	155.196.282	216.101.215
4..1	Belanja Bagi Hasil	36.657.832	11.285.518	45.944.584
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	172.161.018	143.910.764	170.156.631

lanjutan Tabel 13

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	228.330.092	357.210.533	39.703.968
1	Penerimaan Pembiayaan	279.830.092	401.229.026	119.964.055
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	92.329.824	20.494.471	25.093.002
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	187.500.268	380.734.555	94.871.053
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	51.500.000	44.018.493	80.260.087
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	14.000.000	0	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	37.500.000	6.518.493	2.000.000
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	37.500.000	78.260.087
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	20.494.471	25.093.002	21.293.143

Tabel 14. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung, 2020-2022 (000 Rp)

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	1.104.884.193	1.146.023.938	1.147.881.201
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	220.893.875	254.494.496	309.462.458
1.1	Pajak Daerah	41.851.859	41.932.338	66.962.734
1.2	Retribusi Daerah	28.025.861	21.903.987	31.578.996
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.035.624	8.105.471	7.035.424
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	141.980.531	182.552.700	203.885.304
2	Pendapatan Transfer	849.181.823	853.102.994	838.345.455
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	752.344.583	772.491.733	741.630.849
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.837.240	80.611.261	96.714.606
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	34.808.494	38.426.448	73.288
3.1	Pendapatan Hibah	34.808.494	17.238	996
3.2	Dana Darurat	0	0	0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	38.409.210	72.292

lanjutan Tabel 14

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	1.124.325.930	1.154.190.154	1.209.203.552
1	Belanja Operasi	847.536.953	938.286.445	958.970.417
1.1	Belanja Pegawai	452.223.336	542.315.525	547.933.902
1.2	Belanja Barang dan Jasa	375.897.937	368.553.398	351.182.651
1.3	Belanja Bunga	0	0	1.160.436
1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
1.5	Belanja Hibah	18.138.180	17.950.022	53.221.636
1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.277.500	9.467.500	5.471.792
2	Belanja Modal	116.438.069	86.144.471	130.873.281
2.1	Belanja Modal Tanah	0	36.347	2.179
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.393.881	27.369.315	52.122.546
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.174.629	27.370.758	38.249.152
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.264.682	28.366.245	38.233.177
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.604.877	3.001.806	2.266.227
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	0	0
3	Belanja Tidak Terduga	35.941.299	7.915.531	6.615.771
3.1	Belanja Tidak Terduga	35.941.299	7.915.531	6.615.771
4	Belanja Transfer	124.409.608	121.843.707	112.744.083
4.1	Belanja Bagi Hasil	9.747.913	6.969.820	7.901.893
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	114.661.696	114.873.887	104.842.190

lanjutan Tabel 14

	Rincian	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	40.549.560	68.667.678	117.089.517
1	Penerimaan Pembiayaan	40.549.560	68.667.678	117.089.517
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.199.560	68.623.953	60.507.389
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	55.899.353
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	43.725	682.775
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	350.000	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	21.107.823	60.501.462	55.767.166

Tabel 15. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli, 2020-2022 (000 Rp)

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	1.012.111.114	1.150.283.516	1.105.440.500
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	104.325.150	163.537.096	144.005.843
1.1	Pajak Daerah	20.541.596	23.318.329	36.707.060
1.2	Retribusi Daerah	11.948.450	8.281.618	36.328.299
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.089.523	6.101.593	5.597.431
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	64.745.581	125.835.556	65.373.053
2	Pendapatan Transfer	737.870.240	949.349.147	960.732.039
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	718.031.691	857.733.622	805.596.463
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.838.549	91.615.525	155.135.576
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	169.915.724	37.397.273	702.618
3.1	Pendapatan Hibah	116.452.911	37.397.273	702.618
3.2	Dana Darurat	0	0	0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	53.462.813	0	0

lanjutan Tabel 15

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	1.003.917.661	1.108.810.932	1.239.853.053
1	Belanja Operasi	757.959.588	771.933.545	802.381.256
1.1	Belanja Pegawai	467.923.912	474.993.797	515.867.248
1.2	Belanja Barang dan Jasa	248.528.891	288.658.317	273.729.368
1.3	Belanja Bunga	0	138.750	3.297.020
1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
1.5	Belanja Hibah	41.326.585	7.904.115	9.234.589
1.6	Belanja Bantuan Sosial	180.200	238.566	253.031
2	Belanja Modal	57.141.113	183.280.093	293.929.283
2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	14.134.424
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.003.925	40.638.989	60.358.663
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.771.388	89.033.687	180.104.496
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.174.998	49.594.105	37.746.358
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.190.802	4.013.312	704.060
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	0	881.282
3	Belanja Tidak Terduga	30.605.993	3.409.319	2.430.457
3.1	Belanja Tidak Terduga	30.605.993	3.409.319	2.430.457
4	Belanja Transfer	158.210.967	150.187.975	141.112.057
4.1	Belanja Bagi Hasil	3.792.033	3.410.243	6.717.100
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	154.418.934	146.777.732	134.394.957

lanjutan Tabel 15

	Rincian	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	56.919.478	75.735.976	175.295.260
1	Penerimaan Pembiayaan	56.919.478	75.735.976	178.295.260
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	56.917.515	65.052.046	117.202.607
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	10.683.930	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	61.092.653
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.963	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	3.000.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	0	0	3.000.000
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	65.112.931	117.208.560	40.882.707

Tabel 16. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem, 2020-2022 (000 Rp)

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	1.475.503.925	1.555.808.558	1.577.410.439
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	219.176.733	252.688.747	301.332.231
1.1	Pajak Daerah	66.452.673	85.667.480	167.957.910
1.2	Retribusi Daerah	9.350.562	9.204.857	10.215.719
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.968.117	10.759.415	9.321.193
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	131.405.381	147.056.995	113.837.410
2	Pendapatan Transfer	1.181.370.504	1.218.932.970	1.251.259.825
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.039.076.219	1.097.820.639	1.060.714.387
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	142.294.285	121.112.331	190.545.438
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	74.956.688	84.186.840	24.818.383
3.1	Pendapatan Hibah	74.956.619	2.673.116	398.546
3.2	Dana Darurat	0	0	0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	69	81.513.724	24.419.836

lanjutan Tabel 16

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	1.464.635.321	1.544.183.408	1.548.907.881
1	Belanja Operasi	1.175.320.216	1.210.443.000	1.199.158.170
1.1	Belanja Pegawai	667.751.387	744.032.553	721.933.660
1.2	Belanja Barang dan Jasa	441.142.742	442.993.592	452.812.861
1.3	Belanja Bunga	2.786	0	0
1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
1.5	Belanja Hibah	65.381.040	18.086.736	18.364.669
1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.042.261	5.330.120	6.046.980
2	Belanja Modal	81.578.988	143.668.862	139.308.068
2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	0
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.885.809	48.585.491	47.219.074
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.105.183	15.612.356	32.102.107
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.465.919	75.187.841	59.535.424
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.122.077	4.283.174	451.462
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	0	0
3	Belanja Tidak Terduga	19.630.351	0	0
3.1	Belanja Tidak Terduga	19.630.351	0	0
4	Belanja Transfer	188.105.766	190.071.545	210.441.643
4..1	Belanja Bagi Hasil	11.558.025	10.816.926	20.875.653
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	176.547.741	179.254.620	189.565.990

lanjutan Tabel 16

	Rincian	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	102.907.118	109.908.336	115.687.587
1	Penerimaan Pembiayaan	102.972.554	113.908.336	118.187.587
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	102.969.341	113.908.336	118.187.587
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	3.213	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	65.436	4.000.000	2.500.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	65.436	4.000.000	2.500.000
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	113.775.722	121.533.486	144.190.145

Tabel 17. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng, 2020-2022 (000 Rp)

	Rincian	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	2.003.219.088	2.083.214.717	2.078.952.626
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	318.986.891	391.988.445	410.564.892
1.1	Pajak Daerah	118.257.304	136.710.405	172.690.000
1.2	Retribusi Daerah	19.809.774	36.150.491	30.078.821
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.823.540	20.045.798	15.581.604
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	161.096.273	199.081.751	192.214.467
2	Pendapatan Transfer	1.573.171.787	1.574.989.396	1.645.523.802
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.353.566.117	1.385.011.330	1.447.240.898
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	219.605.670	189.978.066	198.282.904
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	111.060.410	116.236.876	22.863.932
3.1	Pendapatan Hibah	111.060.410	1.190.748	0
3.2	Dana Darurat	0	0	0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	115.046.128	22.863.932

lanjutan Tabel 17

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	2.006.101.484	2.070.375.556	2.079.736.131
1	Belanja Operasi	1.464.223.635	1.625.692.312	1.679.161.875
1.1	Belanja Pegawai	806.021.126	847.840.859	884.709.857
1.2	Belanja Barang dan Jasa	630.616.988	710.959.203	704.950.970
1.3	Belanja Bunga	0	0	0
1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
1.5	Belanja Hibah	27.432.521	60.348.590	80.515.690
1.6	Belanja Bantuan Sosial	153.000	6.543.660	8.985.358
2	Belanja Modal	259.440.204	202.523.214	155.220.623
2.1	Belanja Modal Tanah	270.182	0	0
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.596.800	86.595.789	51.709.999
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.142.107	47.365.062	28.100.745
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.776.307	49.561.276	31.187.036
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	45.654.808	19.001.087	108.292
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	0	44.114.551
3	Belanja Tidak Terduga	46.090.243	5.190.431	785.961
3.1	Belanja Tidak Terduga	46.090.243	5.190.431	785.961
4	Belanja Transfer	236.347.402	236.969.599	244.567.672
4.1	Belanja Bagi Hasil	11.875.752	11.594.367	14.266.585
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	224.471.650	225.375.232	230.301.087

lanjutan Tabel 17

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	71.434.130	59.551.735	56.709.296
1	Penerimaan Pembiayaan	75.834.130	68.551.735	72.390.896
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.834.130	68.551.735	72.390.896
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	4.400.000	9.000.000	15.681.600
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	4.400.000	9.000.000	15.681.600
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	68.551.734	72.390.896	55.925.791

Tabel 18. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar, 2020-2022 (000 Rp)

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	1.964.054.093	1.655.186.441	2.106.397.942
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	731.261.281	792.362.414	888.051.856
1.1	Pajak Daerah	489.693.285	521.849.342	690.248.000
1.2	Retribusi Daerah	29.183.791	23.367.792	19.995.243
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	56.572.597	53.948.292	43.605.950
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	155.811.608	193.196.988	134.202.663
2	Pendapatan Transfer	964.680.368	862.735.023	1.202.729.157
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	950.344.306	862.588.209	1.010.696.716
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.336.062	146.814	192.032.441
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	268.112.444	89.004	15.616.929
3.1	Pendapatan Hibah	268.112.444	0	0
3.2	Dana Darurat	0	0	0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	89.004	15.616.929

lanjutan Tabel 18

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	1.884.553.112	1.925.447.211	2.024.804.785
1	Belanja Operasi	1.593.414.601	1.631.248.599	1.655.230.466
1.1	Belanja Pegawai	747.920.479	821.977.271	821.015.557
1.2	Belanja Barang dan Jasa	708.601.582	605.309.425	705.038.849
1.3	Belanja Bunga	0	0	0
1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
1.5	Belanja Hibah	94.690.525	200.570.748	125.315.364
1.6	Belanja Bantuan Sosial	42.202.014	3.391.155	3.860.696
2	Belanja Modal	95.126.157	102.374.462	198.780.903
2.1	Belanja Modal Tanah	317.581	9.466.985	59.994
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.937.624	41.808.089	49.623.800
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.274.877	29.228.843	88.128.769
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.598.949	21.029.773	57.913.543
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.997.125	840.772	3.054.797
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	0	0
3	Belanja Tidak Terduga	34.287.081	30.712.586	6.970.660
3.1	Belanja Tidak Terduga	34.287.081	30.712.586	6.970.660
4	Belanja Transfer	161.725.274	161.111.564	163.822.756
4..1	Belanja Bagi Hasil	47.717.587	47.902.597	59.220.774
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	114.007.687	113.208.967	104.601.982

lanjutan Tabel 18

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	233.301.073	307.602.102	367.347.177
1	Penerimaan Pembiayaan	237.423.790	316.302.055	378.347.177
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	237.423.790	312.802.055	378.347.177
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	3.500.000	0
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	4.122.716	8.699.953	11.000.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	4.122.716	8.699.953	11.000.000
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	312.802.055	37.341.331	448.940.334

Tabel 19. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota se-Bali, 2020-2022 (000 Rp)

	Rincian	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	20.820.511.724	16.718.393.696	16.871.331.013
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9.143.215.607	5.902.732.832	4.682.548.974
1.1	Pajak Daerah	6.981.859.343	3.884.670.591	2.715.072.976
1.2	Retribusi Daerah	509.063.772	342.268.221	221.915.001
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	297.935.580	299.853.101	288.593.595
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	1.354.356.912	1.375.940.919	1.456.967.403
2	Pendapatan Transfer	11.181.051.903	9.699.919.081	10.072.180.339
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	9.379.346.931	8.280.848.981	8.835.589.904
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.801.704.972	1.419.070.100	1.236.590.435
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	496.244.214	1.115.741.783	2.116.601.699
3.1	Pendapatan Hibah	463.591.290	637.425.528	70.144.590
3.2	Dana Darurat	0	0	1.947.225.121
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.652.924	478.316.255	99.231.989

lanjutan Tabel 19

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	21.866.872.690	17.704.299.497	16.298.064.180
1	Belanja Operasi	15.177.863.730	13.530.856.656	12.130.038.410
1.1	Belanja Pegawai	7.153.899.285	7.355.500.852	6.908.476.722
1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.934.583.918	5.080.961.444	4.648.112.916
1.3	Belanja Bunga	20.041.488	0	46.090.553
1.4	Belanja Subsidi	0	160.000	2.282.650
1.5	Belanja Hibah	713.978.653	967.068.280	462.068.329
1.6	Belanja Bantuan Sosial	355.360.386	127.166.080	63.007.239
2	Belanja Modal	3.907.435.614	2.350.423.756	2.127.245.893
2.1	Belanja Modal Tanah	198.828.420	23.006.760	25.864.103
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	679.859.175	493.509.963	385.031.237
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.906.612.095	808.792.552	1.122.828.311
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	949.232.967	778.208.029	503.067.179
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	172.902.957	246.906.451	81.730.491
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	0	8.724.572
3	Belanja Tidak Terduga	45.903.906	102.875.938	372.547.158
3.1	Belanja Tidak Terduga	45.903.906	102.875.938	372.547.158
4	Belanja Transfer	2.735.669.441	1.835.024.779	1.668.232.719
4..1	Belanja Bagi Hasil	944.764.582	482.771.616	334.528.032
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	1.790.904.859	1.352.253.163	1.333.704.687

lanjutan Tabel 19

	Rincian	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	1.046.360.966	1.324.141.527	1.535.241.708
1	Penerimaan Pembiayaan	1.196.164.966	1.505.041.069	1.604.145.201
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	925.657.730	550.856.389	783.801.690
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	100.000.000	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	264.357.236	848.034.680	552.711.637
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	5.400.000	267.631.874
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.150.000	750.000	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	149.804.000	180.899.542	68.903.493
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	6.000.000	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	76.759.000	51.999.542	27.218.493
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	67.645.000	117.500.000	37.500.000
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	5.400.000	4.185.000
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	338.235.726	2.108.508.541

Tabel 20. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Bali, 2020-2022 (000 Rp)

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH	16.230.009.961	14.938.329.426	17.598.716.197
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4.718.575.738	4.582.907.200	7.229.117.366
1.1	Pajak Daerah	2.805.626.389	2.512.573.242	5.167.585.325
1.2	Retribusi Daerah	233.824.481	204.872.260	266.202.960
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	381.630.885	334.104.065	285.444.757
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	1.297.493.983	1.531.357.633	1.509.884.325
2	Pendapatan Transfer	9.650.816.522	9.817.567.019	10.299.136.894
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.584.741.599	8.834.311.059	8.811.042.474
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.066.074.923	983.255.960	1.488.094.420
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.860.617.700	537.855.207	70.461.937
3.1	Pendapatan Hibah	1.807.154.818	111.626.426	6.861.262
3.2	Dana Darurat	0	0	0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	53.462.882	426.228.781	63.600.674

lanjutan Tabel 20

Rincian		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
B	BELANJA DAERAH	16.293.296.671	15.207.626.880	16.800.551.719
1	Belanja Operasi	12.441.726.999	11.534.470.249	12.788.613.896
1.1	Belanja Pegawai	6.108.811.380	6.329.290.878	6.612.694.763
1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.052.981.940	4.519.141.501	5.219.133.826
1.3	Belanja Bunga	7.091.295	13.958.665	23.886.293
1.4	Belanja Subsidi	1.121.800	16.000	1.265.758
1.5	Belanja Hibah	1.130.197.087	629.972.161	895.890.528
1.6	Belanja Bantuan Sosial	141.523.497	42.091.044	35.742.728
2	Belanja Modal	1.746.633.483	1.704.848.330	2.067.956.101
2.1	Belanja Modal Tanah	33.340.563	20.434.325	49.060.286
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	463.479.421	501.322.242	532.879.111
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	852.921.390	600.927.669	998.352.360
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	292.121.432	530.080.615	412.906.734
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	104.770.677	52.039.478	28.837.719
2.6	Belanja Modal Lainnya	0	44.000	45.919.890
3	Belanja Tidak Terduga	376.417.944	351.432.279	53.002.119
3.1	Belanja Tidak Terduga	376.417.944	351.432.279	53.002.119
4	Belanja Transfer	1.728.518.245	1.616.876.022	1.890.979.603
4.1	Belanja Bagi Hasil	382.214.252	254.248.200	481.529.012
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	1.346.303.993	1.362.627.822	1.409.450.591

lanjutan Tabel 20

	Rincian	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)
C	PEMBIAYAAN	1.103.318.414	1.533.759.628	1.197.067.464
1	Penerimaan Pembiayaan	1.220.856.566	1.603.663.074	1.366.431.141
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	978.389.115	1.087.560.729	1.149.241.696
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	237.750.268	508.366.953	150.770.406
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000	7.735.392	66.419.039
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	4.217.183	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	117.538.152	69.903.446	169.363.677
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	14.000.000	0	0
2.2	Penyertaan Modal Daerah	50.088.152	28.218.446	86.503.590
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	50.250.000	37.500.000	78.260.087
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	3.200.000	4.185.000	4.600.000
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	1.040.031.703	1.264.462.175	1.995.231.942

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.

Bisma, I., Dewa Gde, and Hery Susanto. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah*. Jurnal Gene Swara Edisi Khusus Vol 4 (2010).

BPS. 2022. *Statistik Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022*. Jakarta : Badan Pusat Statistik

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.

Munir, Dasril. Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAP.

Sholikhah, Agustiyana Lailatus dan Nuwun Priyono. 2022. Analisis Beban Kerja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi* Volume 14 Nomor 1 Mei 2022.

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI***

Jl. Raya Puputan No.1 Renon, Denpasar 80226
Telp. (0361)238159, 243696, Fax : (0361) 238962
E-mail : bps5100@bps.go.id
Homepage : <https://bali.bps.go.id/>

ISSN 2477-7773

